

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2024



**PENGADILAN AGAMA
WATAMPONE**

✉ pawatampone1a@gmail.com
☎ 0481-21018
📍 Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A
Watampone Sulawesi Selatan, 92716
🌐 www.pa-watampone.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA SERTA PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA	6
A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama	
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	6
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	8
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	9
B. Penyelesaian Perkara	9
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	9
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	10
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	12
4. Banding, Kasasi, dan PK	12
5. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi	12
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	13
1. Posbakum	14
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	15
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	17
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	19
Mutasi.....	27
Promosi	28
Pensiun	28
Hukuman Disiplin	29
Diklat	29
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA TEKNOLOGI INFORMASI	38
A. Pengelolaan Keuangan	38

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	43
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	48
Implementasi e-Court.....	48
Implementasi SIPP	51
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	55
A. Pembangunan Zona Integritas	55
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	56
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	60
BAB VI PENGAWASAN	76
A. Internal.....	76
B. Evaluasi.....	78
BAB VII PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi.....	80
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1	Matrik Keadaan Perkara pada Wialayah Hukum Pengadilan Agama Watampone Tahun 2024	6
Tabel 2.2	Jumlah Perkara yang diputus Tahun 2024.....	7
Tabel 2.3	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024.	7
Tabel 2.4	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024..	9
Tabel 2.5	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2024.....	9
Tabel 2.6	Sisa perkara Permohonan (Volunter) Tahun 2024	10
Tabel 2.7	Sisa Perkara Gugatan (Contentius) Tahun 2024.....	10
Tabel 2.8	Rentang Waktu Penyelesaian Perkara	11
Tabel 2.9	Data Pelaksanaan Mediasi	13
Tabel 2.10	Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum).....	15
Tabel 2.11	Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling.....	16
Tabel 2.12	Pelaksanaan Kegiatan Sidang Pelayanan Terpadu	17
Tabel 2.13	Pelaksanaan Pelayanan Perkara Prodeo	18

BAB III

Tabel 3.1	Matrik Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan / Golongan.....	19
Tabel 3.2	Matrik Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	22
Tabel 3.3	Daftar Mutasi Tahun 2024 pada Pengadilan Agama Watampone	27
Tabel 3.4	Daftar Promosi Tahun 2024 pada Pengadilan Agama Watampone	28
Tabel 3.5	Daftar Pensiun Tahun 2024 pada Pengadilan Agama Watampone	29
Tabel 3.6	Daftar Pensiun Tahun 2024 pada Pengadilan Agama Watampone	29

Tabel 3.7	Daftar Pegawai / Hakim yang telah Mengikuti Diklat pada Tahun 2024	30
-----------	--	----

BAB IV

Tabel 4.1	Rincian Anggaran DIPA 309076 Tahun 2024.....	42
Tabel 4.2	Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Watampone	43
Tabel 4.3	Rumah Dinas Pengadilan Agama Watampone.....	43
Tabel 4.4	Matrik Bangunan Gedung Pengadilan Agama Watampone	44
Tabel 4.5	Matrik Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran Pengadilan Agama Watampone.....	45
Tabel 4.6	Total Aset Negara di Pengadilan Agama Watampone dalam Rupiah.....	48
Tabel 4.7	Matrik Keadaan Perkara e-Court pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone Tahun 2024	50
Tabel 4.8	Tahapan Perkara Melalui e-Litigasi Tahun 2024	51

DAFTAR GAMBAR

BAB I

Gambar 1.1	Wilayah Kabupaten Bone dalam Peta.....	2
------------	--	---

BAB II

Gambar 2.1	Diagram Rentang Waktu Penyelesaian Perkara.....	11
------------	---	----

BAB III

Gambar 3.1	Diagram Komposisi SDM Berdasarkan Golongan.....	22
------------	---	----

Gambar 3.2	Diagram Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir	25
------------	--	----

Gambar 3.3	Diagram Jumlah Tenaga Teknis Yudisial dengan Non Yudisial	26
------------	--	----

Gambar 3.4	Diagram Klasifikasi Tenaga Teknik Yudisial.....	26
------------	---	----

BAB IV

Gambar 4.1	Diagram Realisasi Anggaran DIPA Satker 309076.....	42
------------	--	----

Gambar 4.2	Tampilan Aplikasi SIPP Web Pengadilan Agama Watampone	53
------------	---	----

BAB V

Gambar 5.1	Tampilan Halaman Awal Aplikasi SIPETTUNI.....	61
------------	---	----

Gambar 5.2	Tampilan Halaman Untuk Pengguna.....	62
------------	--------------------------------------	----

Gambar 5.3	Tampilan Halaman untuk Admin.....	62
------------	-----------------------------------	----

Gambar 5.4	Tampilan Halaman Login Aplikasi SIPENGAMPU.....	63
------------	---	----

Gambar 5.5	Tampilan Halaman Dashboard SIPENGAMPU.....	64
------------	--	----

Gambar 5.6	Tampilan Bagian Home (Sebelum Login).....	65
------------	---	----

Gambar 5.7	Tampilan Menu Perencanaan Satker 307509.....	66
------------	--	----

Gambar 5.8	Tampilan Dashboard (Setelah User Login)	66
------------	---	----

Gambar 5.9	Kursi Prioritas dan untuk Kursi Roda di Ruang Tunggu	67
------------	--	----

Gambar 5.10	Parkir Khusus Disabilitas.....	68
-------------	--------------------------------	----

Gambar 5.10	Pojok Merokok.....	69
-------------	--------------------	----

Gambar 5.11	Tampilan Halaman Lacak Proses Tahapan Perkara.....	71
-------------	--	----

Gambar 5.12	Tampilan Halaman Buru Tamu Digital.	72
-------------	--	----

Gambar 5.13	Tampilan Login Sistem Administrasi Kepegawaian.	73
Gambar 5.14	Sistem Administrasi Kepegawaian.	74
Gambar 5.1	Tampilan Halaman Statistik Data SIPP.	75



BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Agama Watampone merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat dan berbiaya ringan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Watampone merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Watampone kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya.

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar. Luas wilayahnya sekitar 4.559 km² atau 9,78 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km. Ibu kota kabupaten Bone adalah Watampone.



Gambar 1.1
Wilayah Kabupaten Bone dalam Peta

Secara geografis, kabupaten Bone berbatasan dengan :

- Utara : Kabupaten Wajo dan Soppeng
- Timur : Teluk Bone
- Selatan : Kabupaten Sinjai dan Gowa
- Barat : Kabupaten Maros, Pangkep, Barru.

Secara astronomis, kabupaten Bone terletak pada posisi $4^{\circ}13'$ – $5^{\circ}6'$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ}42'$ - $120^{\circ}30'$ Bujur Timur. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa menjadikan kabupaten Bone beriklim tropis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura Ps.1, maka Pengadilan Agama Watampone terbentuk pada tanggal 1 Januari 1958 Vide Instelling Besluit Menteri Agama dan juga memenuhi Mission Departemen Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Watampone di Sulawesi pada waktu itu.

Pengadilan Agama Watampone beralamat di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A, kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, provinsi Sulawesi Selatan. Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bone, yang terdiri dari 27 kecamatan dan 372 desa / kelurahan.

Pengadilan Agama Watampone sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah kabupaten Bone, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Watampone berfungsi menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tententu.

Visi, Misi, dan Sasaran Strategis

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Visi Pengadilan Agama Watampone adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Watampone adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Watampone, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Watampone berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Watampone untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategis (*outcome*) yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator :

- a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu;

- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 - d. Index kepuasan pencari keadilan.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- Indikator :
- a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
 - c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
 - d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Indikator :
- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
 - c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
 - d. Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- Indikator : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

BAB II
KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA SERTA PENINGKATAN
MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pada tahun 2023 terdapat sisa perkara yang diproses di tahun 2024. Tabel berikut ini memperlihatkan keadaan perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2024:

Tabel 2.1
Matrik Keadaan Perkara pada Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Watampone Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Cerai Gugat	931	904	47	20 sisa perkara tahun 2023 diputus
2	Cerai Talak	239	228	18	7 sisa perkara tahun 2023 diputus
3	Harta Bersama	6	11	0	5 sisa perkara tahun 2023 diputus
4	Kewarisan	16	14	6	4 sisa perkara tahun 2023 diputus
5	Asal usul Anak	25	23	2	-
6	Pengesahan/Itsbat Nikah	460	374	87	1 sisa perkara tahun 2023 diputus
7	Dispensasi Kawin	16	16	0	-
8	Wali Adhal	6	6	0	-
9	Perwalian	25	23	2	-

10	Penetapan Ahli Waris	64	61	3	-
11	Poligami	1	1	0	-
12	Lain – lain	32	30	2	-
13	Ekonomi Syariah	1	1	0	
	TOTAL	1822	1970	37	

Tabel 2.2
Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2024

No	Bulan	Perkara Putus	
		Permohonan	Gugatan
1	Januari	38	93
2	Februari	61	88
3	Maret	22	84
4	April	9	54
5	Mei	45	116
6	Juni	33	78
7	Juli	56	112
8	Agustus	45	82
9	September	23	102
10	Oktober	43	128
11	Nopember	30	117
12	Desember	30	117
	Total	435	1171

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2024 sebanyak 11 perkara, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024

No.	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	982/Pdt.G/2023/PA.Wtp.	8 Januari 2024	Putus Tingkat Banding

2	1075/Pdt.G/2023/PA.Wtp.	16 Februari 2024	Putus Tingkat Kasasi
3	1045/Pdt.G/2023/PA.Wtp	23 Februari 2024	Putus Tingkat Kasasi
4	1104/Pdt.G/2023/PA.Wtp	26 Februari 2024	Putus Tingkat Kasasi
5.	1264/Pdt.G/2023/PA.Wtp	7 Maret 2024	Putus Tingkat Kasasi
6.	142/Pdt.G/2024/PA.Wtp	18 Maret 2024	Putus Tingkat Banding
7.	1097/Pdt.G/2024/PA.Wtp	17 April 2024	Proses Tingkat Kasasi
8.	262/Pdt.G/2024/PA.Wtp	17 Mei 2024	Putus Tingkat Banding
9.	769/Pdt.G/2024/PA. Wtp	5 November 2024	Putus Tingkat Banding
10.	704/Pdt.G/2024/PA. Wtp	23 Desember 2024	Proses Tingkat Banding
11.	1013/Pdt.G/2024/PA.Wtp	30 Desember 2024	Proses Tingkat Banding

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pada tahun 2024, hanya terdapat 5 perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1.	1045/Pdt.G/2023/ PA Wtp	29 April 2024	Putus Tingkat Kasasi

2.	1104/Pdt.G/2023/ PA Wtp	13 Mei 2024	Putus Tingkat Kasasi
3,	1264/Pdt.G/2023/ PA Wtp	17 Mei 2024	Putus Tingkat Kasasi
4,	1075/Pdt.G/2023/ PA Wtp	28 Mei 2024	Putus Tingkat Kasasi
5.	1097/Pdt.G/2023/PA Wtp	19 Juli 2024	Proses Tingkat Kasasi

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pada tahun 2024 terdapat 1 perkara yang mengajukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali).

Tabel 2.5
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2024

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran
1	24/Pdt.G/2021/PA.Wtp	3 Juni 2024
	-	-

B. Penyelesaian Perkara

Tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama Watampone sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara berdasarkan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya.

Berikut ini merupakan gambaran tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2024 :

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

a. Perkara Permohonan (Volunter)

Terdapat 1 sisa perkara Permohonan (Volunter) tahun 2023 yang diputus / diselesaikan di tahun 2024. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Sisa perkara Permohonan (Volunter) Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah Perkara
1.	Pengesahan/Itsbat Nikah	1
2.	Dispensasi Kawin	0
3.	Penetapan Ahli Waris	0
4.	Lain – lain	0
Jumlah		1

b. Perkara Gugatan (Contentius)

Sisa perkara Gugatan tahun 2024 sebanyak 36 perkara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Sisa Perkara Gugatan (Contentius) Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah Perkara
1.	Cerai Talak	7
2.	Cerai Gugat	20
3.	Harta Bersama	5
4.	Kewarisan	4
Jumlah		36

Berdasarkan tabel 2.6 dan tabel 2.7, maka jumlah sisa perkara tahun 2023 yang diputus / diselesaikan pada tahun 2024 adalah 37 perkara (1 + 36).

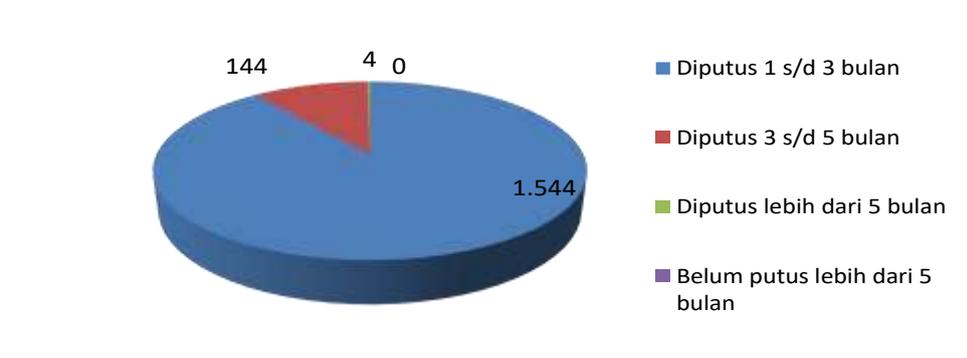
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Tabel 2.8
Rentang Waktu Penyelesaian Perkara

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan				Ket.
		Diputus 1 s/d 3 bulan	Diputus 3 s/d 5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan	Belum putus lebih dari 5 bulan	
1	Januari	124	7	0	0	

2	Februari	144	5	0	0	
3	Maret	102	4	0	0	
4	April	60	2	1	0	
5	Mei	131	30	0	0	
6	Juni	96	15	0	0	
7	Juli	159	9	0	0	
8	Agustus	117	9	0	0	
9	September	114	11	0	0	
10	Oktober	152	19	1	0	
11	Nopember	137	11	0	0	
12	Desember	208	22	2	0	
	Jumlah	1.544	144	4	0	
	Total	1.688		4	0	

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah perkara yang diputus tepat waktu (tidak lebih dari 5 bulan) pada tahun 2024 sebanyak 1.688 perkara.



Gambar 2.1

Diagram Rentang Waktu Penyelesaian Perkara

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

a. Banding

Berdasarkan tabel 2.3, jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2024 sebanyak 11 perkara, dari 1.692 perkara yang diselesaikan. Dengan demikian, jumlah perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 1.681 perkara. Oleh sebab itu, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebesar 99,34 %.

b. Kasasi

Berdasarkan tabel 2.4, jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2024 sebanyak 6 perkara, dari 1.692 perkara yang diselesaikan. Dengan demikian, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 1.686 perkara. Oleh sebab itu, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 99,64 %.

c. Peninjauan Kembali

Berdasarkan tabel 2.5, terdapat 1 perkara yang mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2024, dari 1692 perkara yang diselesaikan. Dengan demikian, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebanyak 1691 perkara. Oleh sebab itu, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebesar 99,94 %.

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Salah satu amanah dari PERMA No. 1 tahun 2016 yakni mewajibkan proses mediasi dalam penanganan perkara, dan Pengadilan Agama Watampone tahun 2024 telah melaksanakan proses mediasi. Realisasi pelaksanaan mediasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Data Pelaksanaan Mediasi

No	Bulan	Jumlah perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil/gagal	Jumlah Perkara masih dalam proses
1	Januari	5	0	4	1
2	Februari	17	0	14	4
3	Maret	12	0	8	8
4	April	7	0	7	8
5	Mei	11	0	14	5

6	Juni	8	1	5	7
7	Juli	10	1	7	9
8	Agustus	6	1	7	7
9	September	7	2	6	6
10	Oktober	14	1	5	14
11	Nopember	6	2	10	8
12	Desember	13	1	5	15
Jumlah		116	9	92	15

B

erdasarkan table di atas, jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2024 hanya 9 perkara.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Akreditasi Penjaminan Mutu adalah salah satu standar dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi. Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menetapkan diri untuk menerapkan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM). SAPM diperlukan untuk mengukur profesionalitas dan transparansi organisasi / satuan kerja.

Suatu organisasi / satuan kerja yang mempunyai fungsi pelayanan kepada masyarakat sudah semestinya mengikuti secara berkelanjutan program tersebut agar mencapai nilai yang lebih baik dan menciptakan keunggulan komparatif.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Watampone senantiasa mengacu dan berpedoman pada sertifikasi SAPM yang telah disusun oleh Dirjen Badilag. Pengadilan Agama Watampone berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi kepada prinsip efektifitas dan efisiensi untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pengguna jasa pengadilan.

Berikut ini beberapa kegiatan unggulan yang telah dilakukan Pengadilan Agama Watampone dalam rangka memberikan pelayanan kepada

masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan, sebagaimana uraian kegiatan dalam Penetapan Kinerja, yaitu :

1. PosBaKum (Pos Bantuan Hukum)

Pelayanan Posbakum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan / permohonan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309076/2024 tanggal 24 November 2023, Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2024 menerima anggaran kegiatan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum) sebesar Rp 70.000.000,- (*enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) dengan target 700 jam layanan, 650 orang. Kegiatan PosBaKum dilaksanakan melalui kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Tenri Sukki sesuai kontrak perjanjian kerjasama Nomor W20-A2/126/HM.01.1/I/2023 tanggal 12 Januari 2023, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*).

Tabel 2.10
Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)

No	Bulan	Jam Layanan	Serapan Anggaran	Jumlah Perkara Yang Terlayani
1	Januari	35	Rp 0,-	140
2	Februari	63	Rp 6.299.924,-	78
3	Maret	35	Rp 6.299.924,-	52
4	April	35	Rp 3.499.955,-	60
5	Mei	63	Rp 3.499.958,-	89
6	Juni	63	Rp 6.299.924,-	72
7	Juli	63	Rp 6.299.924,-	67
8	Agustus	63	Rp 6.299.924,-	68
9	September	63	Rp 6.299.924,-	84

10	Oktober	63	Rp 6.299.924,-	94
11	Nopember	63	Rp 6.299.924,-	91
12	Desember	63	Rp. 12.599.848,-	66
	Jumlah	700	Rp. 69.999.153,-	961

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 961 perkara yang terlayani dalam 700 Jam Layanan. Dengan demikian, realisasi kegiatan layanan PosBaKum sebesar 100 %, sesuai dengan target.

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

a. Sidang di luar gedung Pengadilan

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan atau biasa disebut (sidang keliling), khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.

Kegiatan sidang di luar gedung bertujuan untuk memberikan akses bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik dan geografis.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Watampone mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan sidang di luar gedung sejumlah Rp 43.792.000,- (*empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dengan target 17 kegiatan.

Tabel 2.11
Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara yang Disidangkan	Serapan Anggaran
1	Sibulue	2	20	Rp. 5.152.000,-
2	Barebbo	1	11	Rp. 2.576.000,-
3	Tellu Siattinge	1	8	Rp. 2.576.000,-

4	Kajuara	2	16	Rp. 5.152.000,-
5	Libureng	1	9	Rp. 2.576.000,-
6	Lapri	1	17	Rp. 2.520.000,-
	Total	8	81	Rp 20.552.000,-

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, sidang di luar gedung yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 8 kegiatan, menyidangkan 81 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 20.552.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang keliling.

b. Sidang Pelayanan Terpadu

Sidang Pelayanan Terpadu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dalam model Pelayanan Terpadu perkara isbat nikah. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam sidang Pelayanan Terpadu yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan Pelayanan Sidang Terpadu (YanDu) sebesar Rp 47.292.000,- (*empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) untuk 8 kegiatan.

Tabel 2.12
Pelaksanaan Kegiatan Sidang Pelayanan Terpadu

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara yang Disidangkan	Serapan Anggaran
1	Cenrana	1	25	Rp. 5.995.500,-
2	Libureng	1	18	Rp. 5.899.500,-

3	Tonra	1	21	Rp. 5.899.500,-
4	Tanete Riattang Timur	1	18	Rp. 5.899.500,-
	Total	4	82	Rp. 23.694.000,-

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, Sidang Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 4 kegiatan, menyidangkan 82 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 23.694.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat Sidang Pelayanan Terpadu.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

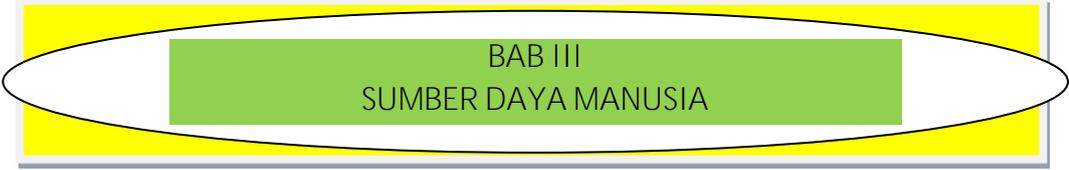
Pengadilan Agama Watampone mendapatkan alokasi anggaran perkara prodeo pada tahun 2024 sejumlah Rp 20.558.000,- (*Dua puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), dengan target 38 perkara.

Tabel 2.13
Pelaksanaan Pelayanan Perkara Prodeo

No	Bulan	Jumlah Perkara Masuk	Serapan Anggaran / Bulan
1	Januari	28	Rp. 5.120.000,-
2	Februari	0	Rp. 1.040.000,-
3	Maret	2	Rp. 3.600.000,-
4	April	20	Rp. 0,-
5	Mei	18	Rp. 840.000,-
6	Juni	30	Rp. 5.880.000,-

7	Juli	26	Rp. 3.310.000,-
8	Agustus	20	Rp. -
9	September	1	Rp. 650.000,-
10	Oktober	0	Rp. 118.000,-
11	Nopember	-	Rp. -
12	Desember	-	Rp. -
	Jumlah	142	Rp. 20.558.000,-

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara prodeo yang terlayani pada tahun 2024 sebanyak 142 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 20.558.000,-. Semua perkara prodeo berhasil diselesaikan.



BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset pokok bagi suatu organisasi dan sangat menentukan keberhasilan tujuan organisasi tersebut. Bila dikaitkan dengan lembaga peradilan, yang merupakan lembaga terhormat, peranan SDM tidak saja penting secara organisasi, tetapi juga menyangkut faktor-faktor filosofis dan sosiologis.

Untuk memperkuat fungsi organisasi pada Pengadilan Agama Watampone, dibutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten dan profesional, terutama untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, kualitas SDM itu sendiri yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam organisasi Pengadilan Agama Watampone perlu diperkuat dan ditingkatkan. Hal tersebut bertujuan agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum, khususnya peradilan agama, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan.

Salah satu agenda implementasi reformasi birokrasi dalah penataan manajemen SDM. Dalam konteks ini diharapkan setiap aparatur pemerintah harus memiliki kompetensi profesional dalam melaksanakan tugas jabatan. Manifestasi tersebut mengisyaratkan bahwa pembinaan dan pengembangan SDM aparatur perlu terus mendapat perhatian, berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab pelayanan publik.

Secara umum, SDM peradilan dapat dikategorikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah adalah SDM teknis yudisial, terdiri dari Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita. Kelompok kedua adalah SDM non teknis yudisial, terdiri dari Sekretaris, Kasubbag, Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

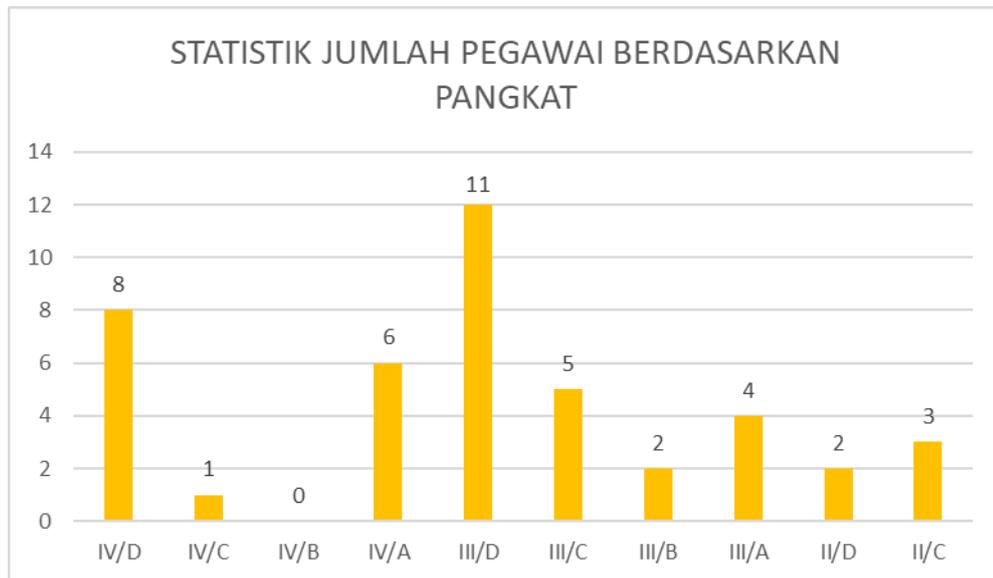
SDM yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2024 berjumlah 42 (empat puluh dua) orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Matrik Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Kepangkatan / Golongan

No	Nama	Pangkat / Gol.	Jabatan
1	Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua
2	Drs. H.M. Yunus K., M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
3	Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
4	Dra. Hj. St. Husnaenah, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
5	Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
6	Dra. Hj. Sitti Johar, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
7	Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
8	Drs. DASRI AKIL, S.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
9	Hadrawati, S.Ag., M.HI.	Pembina Utama Muda, IV/c	Wakil Ketua
10	Rusli, S.H.I., M.H.	Pembina (IV/a)	Hakim
11	Lukman Patawari, S.H.	Pembina IV/a	Panitera
12	Zainuddin, S.Ag.	Pembina, IV/a	Sekretaris
13	Ninik Hartini Mansyur, S.H., M.H.	Pembina, IV/a	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
14	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	Pembina, IV/a	Analisis Pengelola Keuangan APBN
15	Haris, S.H.I., M.Sy.	Pembina, IV/a	Panitera Pengganti
16	Bintang, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Panmud Permohonan
17	Hayad Jusa, S.Ag.	Penata Tk.I, III/d	Panmud Hukum
18	Andi Suardi, S.Ag.	Penata Tk.I, III/d	Panmud Gugatan
19	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	Penata Tk.I, III/d	Analisis Pengelola Keuangan APBN
20	Hj. Fitriani, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
21	Siti Jamilah, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
22	Dra. Hj. Samsang	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti

23	Khumaeni, S.H., M.H	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
24	Dra. Hj. Rosmini	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
25	Muhammad Syahrani, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Juru Sita
26	Andi Muhammad Amin, S.H.I.	Penata Tk.I, III/d	Penata Layanan Operasional
27	Agustiawati, S.E., S.H.	Penata, III/c	Panitera Pengganti
28	Maryati	Penata, III/c	Panitera Pengganti
29	Saiful Bachri, S.H.	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
30	Asril Amrah, S.H.	Penata, III/c	Panitera Pengganti
31	Ridmajayanti, S.Sos.	Penata, III/c	Juru Sita
32	Panggih Tridarma, S.Kom.	Penata Muda Tk I, III/b	Pranata Komputer Pertama
33	Breend Benny Dharmawan, S.E., M.M.	Penata Muda Tk I, III/b	Penelaah Teknis Kebijakan
34	Nanni, S.AN.	Penata Muda, III/a	Penata Layanan Operasional
35	Arridha Ahmad, S.Sy.	Penata Muda, III/a	Analisis Perkara Peradilan
36	Muafiyah, S.H.	Penata Muda, III/a	Analisis Perkara Peradilan
37	Nurfajriani, S.H.	Penata Muda, III/a	Analisis Perkara Peradilan
38	ST. Samsidar, A.Md.	Pengatur Tk I, II/d	Arsiparis Terampil
39	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md.	Pengatur Tk I, II/d	Pengolah Data dan Informasi
40	Herdha Rahma Anugrah. A.Md. Ak	Pengatur, II/c	Pengolah Data dan Informasi
41	Wahyuni Isfa Aulia ,A.Md	Pengatur, II/c	Pengelola Penanganan Perkara
42	Metria Dwi Virahesti, A.Md, A.B.	Pengatur, II/c	Pengelola Penanganan Perkara



Gambar 3.1

Diagram Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

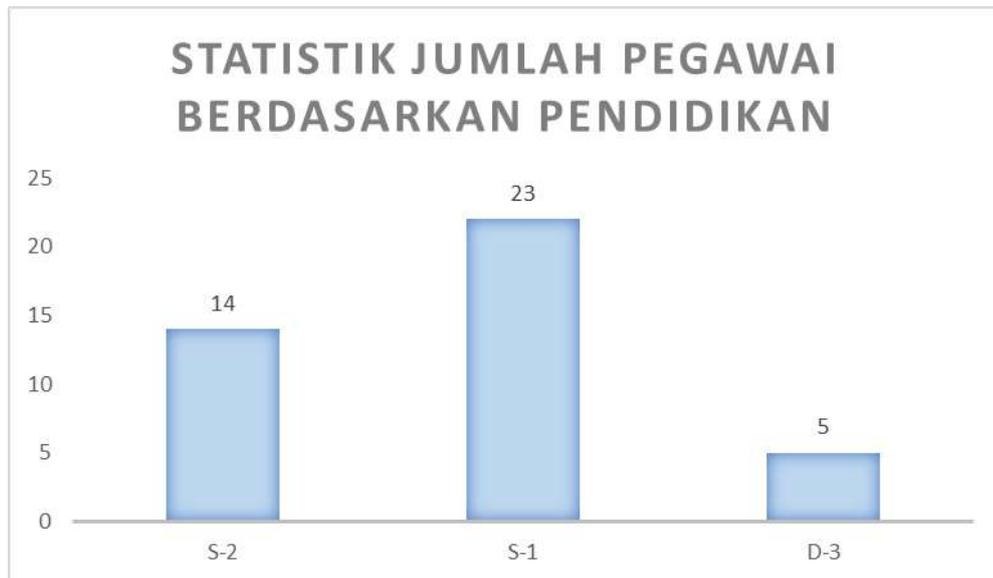
Tabel 3.2

Matriks Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Nama	Pendidikan Terakhir		Jabatan
		Tingkat Ijazah	Tempat Pendidikan	
1	Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.	S2	Universital 45 Makassar	Ketua
2	Hadrwati, S.H., M.H.I.	S2	UIN Alauddin Makassar	Wakil Ketua
3	Drs. M. Yunus, K. M.H.	S2	Universitas 45 Makassar	Hakim
4	Dra. Hj. Siti Amirah, M.H.	S2	Universitas Cendrawasih Jayapura	Hakim
5	Dra. Hj. Siti Husnaenah, M.H.	S2	IAIN Palopo	Hakim
6	Dra. Hj. Sitti Johar, M.H.	S2	UMI Makassar	Hakim
7	Drs. H. Jabbar, M.H.	S2	Universitas Indonesia Timur Makassar	Hakim
8	Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.	S2	Universitas 45 Makassar	Hakim

9	Rusli, S.H.I., M.H.	S2	Universitas Negeri Gorontalo	Hakim
10	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	S2	STAIN Watampone	APK APBN
11	Ninik Hartini Mansyur, S.H., M.H.	S2	Universitas Bosowa Makassar	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
12	Haris, S.H.I., M.Sy.	S2	IAIN Watampone	Panitera Pengganti
13	Breend Benny Dharmawan, S.E., M.M.	S2	Universitas Diponegoro Semarang	Penelaah Teknis Kebijakan
14	Khumaeni, S.H., M.H	S2	Institut Agama Islam Negeri Palopo	Panitera Pengganti
15	Drs. Dasri Akil, S.H.	S1	STIH Pengayoman Watampone	Hakim
16	Zainuddin, S.Ag	S1	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASAR	Sekretaris
17	Lukman Patawari, S.H.	S1	UMI Makassar	Panitera
18	Hayad Jusa, S.Ag.	S1	IAIN Watampone	Panmud Hukum
19	Bintang, S.H.	S1	Universitas 45 Makassar	Panmud Permohonan
20	Andi Suardi, S.Ag.	S1	STAIN Watampone	Panmud Gugatan
21	Saiful Bachri, S.H.	S1	Universitas Indonesia	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
22	Dra. Hj. Rosmini	S1	IAIN Alauddin Watampone	Panitera Pengganti
23	Siti Jamillah, S.H.	S1	UMI Makassar	Panitera Pengganti
24	Hj. Fitriani, S.Ag.	S1	UMI Makassar	Panitera Pengganti
25	Dra. Hj. Samsang	S1	IAIN Watampone	Panitera Pengganti
26	Maryati M, S.H	SI	UNHAS	Panitera Pengganti
27	Agustiawati, S.E., S.H.	S1	STIH Watampone	Panitera Pengganti
28	Asril Amrah, S.H.I.	S1	Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Mangkoso	Panitera Pengganti
29	Muhammad Syahrani, S.H.	S1	STIH Watampone	Juru Sita
30	Ridmajayanti, S.Sos.	S1	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimanggalatung Bone	Juru Sita

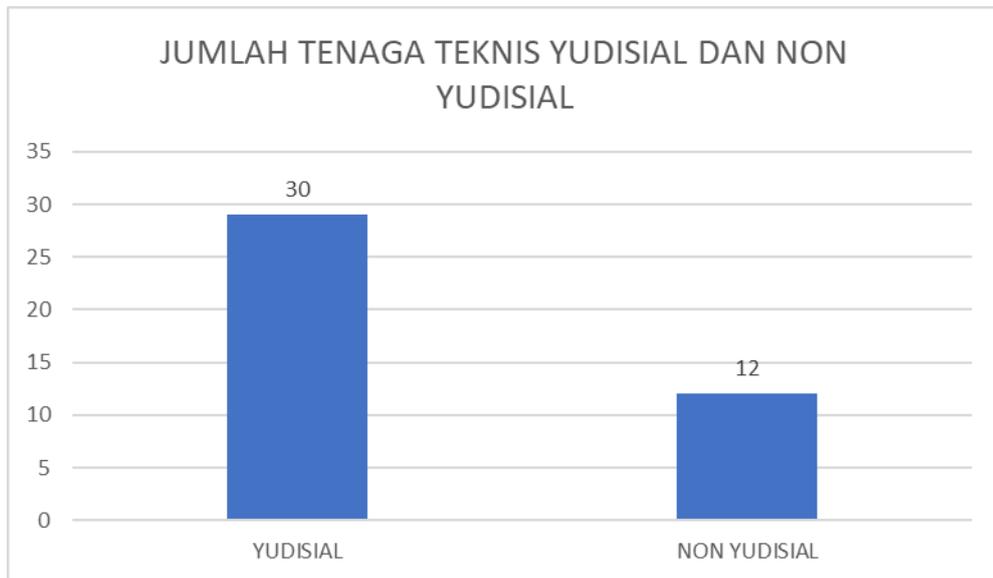
31	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	S1	UIN Alauddin Makassar	APK APBN
32	Andi Muhammad Amin, S.H.I.	S1	STAI DDI AD Mangkoso	Penata Layanan Operasional
33	Nanni, S.AN.	S1	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Veteran Palopo	Penata Layanan Operasional
34	Panggih Tridarma, S.Kom.	SI	Universitas Diponegoro Semarang	Pranata Komputer
35	Arridha Ahmad, S.Sy.	S1	STAIN Watampone	Analisis Perkara Peradilan
36	Muafiyah, S.H.	S1	STAIN Watampone	Analisis Perkara Peradilan
37	Nurfajriani, S.H.	S1	STAIN Watampone	Analisis Perkara Peradilan
38	ST. Samsidar, A.Md.	D-III	Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar	Arsiparis Terampil
49	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md.	D-III	Univ. Jenderal Sudirman Purwokerto	Pengolah Data dan Informasi
40	Wahyuni Isfa Aulia, A.Md.	D-III	Politeknik Negeri Ujung Pandang	Pengelola Penanganan Perkara
41	Metria Dwi Virahesti A,Md. A.B.	D-III	Politeknik Negeri Semarang	Pengelola Penanganan Perkara
42	Herdha Rahma Anugrah, A.Md, Ak.	D-III	Universitas Diponegoro Semarang	Pengolah Data dan Informasi



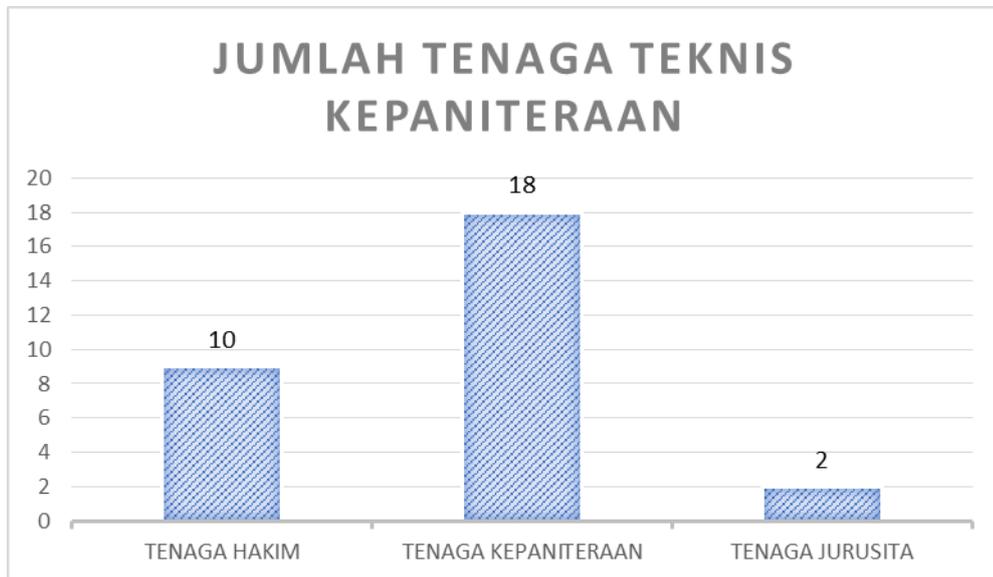
Gambar 3.2

Diagram Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Dalam periode tahun 2024, sesuai perkembangan struktur organisasi Peradilan Agama, keadaan SDM teknis yudisial dan non teknis yudisial di Pengadilan Agama Watampone adalah terdapat 10 orang Hakim, 18 orang Kepaniteraan dan 2 orang Juru Sita, serta Kesekretariatan sebanyak 12 orang. Adapun perkembangan SDM pada Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2024 dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Gambar 3.3
 Diagram Jumlah Tenaga Teknis Yudisial dengan Non Yudisial



Gambar 3.4
 Diagram Klasifikasi Tenaga Teknik Yudisial

1. Mutasi

Mutasi merupakan suatu perubahan posisi, jabatan, tempat maupun pekerjaan yang dilakukan, baik secara horisontal maupun vertikal dalam suatu organisasi.

Upaya ini dilakukan Mahkamah Agung terhadap SDM, khususnya pada Pengadilan Agama Watampone yang menjadi bagian dari fungsi pengembangan SDM karena tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja. Selain itu, mutasi ini juga menjadi stimulus bagi SDM untuk meningkatkan kinerjanya, dan bagi Pengadilan Agama Watampone berguna untuk menciptakan keseimbangan antara SDM dengan komposisi pekerjaan/jabatan.

Perkembangan mutasi tahun 2024 pada Pengadilan Agama Watampone dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3

Daftar Mutasi Tahun 2024 pada Pengadilan Agama Watampone

No	Nama	Jabatan lama	Jabatan baru
1	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.	Ketua PA Watampone	Ketua PA Sengkang
2	Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H	Ketua PA Sengkang	Ketua PA Watampone
3	Dra. Hj. Warni, M.H.	Hakim PA Watampone	Hakim PA Sengkang
4	Zainuddin, S.Ag	Sekretaris PA Bulukumba	Sekretaris PA Watampone
5	Rusli, S.H.I., M.H.	Ketua PA Bungku	Hakim PA Watampone
6	Khumaeni, S.H., M.H	Panitera PA Masamba	Panitera Pengganti PA Watampone
7	Muniroh Nahdi, S.H., M.H.	Sekretaris PA Watampone	Panitera Pengganti PA Makassar
8	Saiful Bachri, S.H.	Kasubag. Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana PA	Kasubag Umum dan Keuangan PA Watampone

		Watansoppeng	
9	Rofika Khoirotun Nisa, A.Md.	Arsiparis Terampil PA Watampone	Arsiparis Terampil PA Jepara
10	ST. Samsidar, A.Md.	Arsiparis Terampil PA Limboto	Arsiparis Terampil PA Watampone

2. Promosi

Promosi merupakan suatu perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang memiliki status yang lebih tinggi. Landasan para pengambil kebijakan memberi promosi kepada pegawai tertentu adalah kepercayaan terhadap kejujuran, kemampuan/kompetensi dan kecakapan pegawai tersebut. Tujuan Mahkamah Agung memberikan promosi pada SDM Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar sehingga dapat menimbulkan kepuasan, kebanggaan pribadi dan status sosial yang semakin tinggi. Selain itu untuk memotivasi pegawai yang menjamin stabilitas kepegawaian dengan direalisasikannya promosi tersebut.

Tabel 3.4

Daftar Promosi Tahun 2024 pada Pengadilan Agama Watampone

No	Nama	Jabatan lama	Jabatan baru
1	Muniroh Nahdi, S.H., M.H.	Sekretaris PA Watampone	Panitera Pengganti PA Makassar
2	Rofika Khoirotun Nisa, A.Md.	Arsiparis Terampil PA Watampone	Arsiparis Terampil PA Jepara

3. Pensiun atau Meninggal Dunia

Pensiun adalah batas usia seseorang bekerja secara produktif. Pada tahun 2024, terdapat pegawai maupun hakim Pengadilan Agama Watampone yang memasuki usia pensiun atau meninggal.

Tabel 3.5

Daftar Pensiun Tahun 2024 pada Pengadilan Agama Watampone

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Drs. Dasri Akil, S.H.	Hakim PA Watampone	Pensiun
2	Hj. Asmah, S.H.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Ortala PA Watampone	Pensiun

4. Hukuman Disiplin

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Pengadilan Agama Watampone Kelas I A Tahun 2024, ada 1 (satu) orang pegawai yang menerima sanksi hukuman disiplin Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 3.6

Daftar Pensiun Tahun 2024 pada Pengadilan Agama Watampone

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H.I., M.Th.I.	Panitera Pengganti PA Watampone	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil

5. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat). Pada pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

Diklat merupakan upaya yang dilakukan untuk peningkatan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi organisasi. Tujuan dilaksanakannya program diklat pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang aparatur agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik.

Tabel 3.7

Daftar Pegawai / Hakim yang telah Mengikuti Diklat pada Tahun 2024

No	Nama Pegawai	Jenis Diklat	Lama Diklat
1	Hadrawati, S.Ag., M.HI.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)"	26 Juli 2024
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan"	23 Agustus 2024
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah"	27 September 2024
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Perlawanan Eksekusi"	15 November 2024
2	Drs. H. M. YUNUS K., S.H., M.H.	Bintek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama " Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS):	26 Juli 2024
3	Khumaeni, S.H.I., M.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis	15 Maret 2024

		Peradilan Agama, "Evaluasi Implementasi Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian dan Kesatuan Hukum di Lingkungan	
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Contra Legem"	17 Mei 2024
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)".	26 Juli 2024.
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama, "Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan"	23 Agustus 2024
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah"	27 September 2024
4	Dra. SAMSANG.	Bintek Peningkatan Kompetensi tenaga teknis Peradilan Agama Contra Legem secara daring	17 Mei 2024
		Bintek peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS)	26 Juli 2024
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama"Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan"	23 Agustus 2024
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Tata kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah(LKS)dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS),Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah " yang	27 September 2024.

		diselenggarakan secara daring	
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Perlawanan Eksekusi"	15 November 2024
5	LUKMAN PATAWARI, S.H.	Bintek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS)	26 Juli 2024
		Bintek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Hukum Wakaf dalam putusan Pengadilan"	23 Agustus 2024
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama 'Tata Kelola Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah(LKS)dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS),Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah"yang diselenggarakan secara daring.	27 September 2024.
		Bimtek peningkatan kompetensi tenaga teknis Peradilan Agama " Perlawanan Eksekusi"	15 November 2024
6	AGUSTIAWATI, S.E., S.H.	Bintek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS)"	26 Juli 2024
7	SITI JAMILA, S.H.	Bintek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Contra Legem secara daring	17 Mei 2024
		Bintek peningkatan Kompetensi Tenaga TEknis Peradilan Agama"titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS)"	26 Juli 2024

		Bintek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama " Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan "	23 Agustus 2024
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah(LKS)dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah(DPS), Relevansinya dengan sengketa Ekonomi Syariah"yang diselenggarakan secara daring	27 September 2024
8	Dra. ROSMINI	Bintek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Contra Legem secara daring	17 Mei 2024
		Bintek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS)"	26 Juli 2024
		Bintek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Hukum Wakaf dalam putusan Pengadilan "	23 Agustus 2024
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah(LKS)dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan sengketa Ekonomi Syariah"yang diselenggarakan secara daring	27 September 2024
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Perlawanan Eksekusi"	15 November 2024
9	HARIS, S.H.I., M.Sy.	Bintek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Contra Legem"yang diselenggarakan Secara daring	17 Mei 2024
		Bintek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	26 Juli 2024

		dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS)"	
		Peningkatan Kompetensi Tenaga teknis Peradilan Agama "Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah(LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS),Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah" yang diselenggarakan secara daring	27 September 2024
10	MARYATI M, S.H.	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Evaluasi Impelemen Tasi Hasil Pleno Kamar MA RI Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian dan Kesatuan Hukum di Lingkungan Pradilan Agama	15 Maret 2024
		Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Contra Legem secara daring	17 Mei 2024
11	ASRIL AMRAH, S.H.I.	Evaluasi Implementasi Hasil PlenoKamar MA RI dalam rangka mewujudkan Kepastian dan kesatuan hukum di Lindungan Peradilan Agama	15 Maret 2024
		Bimtek peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan Agama "Contra Legem"	17 Mei 2024
		Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Hukum WAKaf Dalam Putusan Pengadilan"	23 Agustus 2024
		Bimtek peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan agama " Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan sengketa ekonomi Syariah"	27 September 2024

		Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Perlawanan Eksekusi"	15 November 2024
12	NURHIDAYAH, S.Ag., M.H.	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Angkatan II Tahun 2024	6 Mei 2024
13	PANGGIH TRIDARMA, S.Kom.	Manajemen Risiko SPBE Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2024	29 Maret 2024
		Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan Batch II Tahun 2024	30 Maret 2024
		Pelatihan Jarak Jauh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan III Tahun 2024	26 April 2024
14	SAIFUL BACHRI, S.H.	Pelatihan Kompetensi PPK Tipe C model MOOC	26 Maret 2024
15	ST. SAMSIDAR, A.Md.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	8 Mei 2024
16	BINTANG, S.H.	Evaluasi Implementasi Hasil Pleno Kamar MA RI dalam Rangka mewujudkan Kepastian dan Kesatuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	15 Maret 2024
		Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan kewenangan Lembaga Penjamin Simpana(LPS)"	26 Juli 2024
		Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Hukum Wakaf dalam putusan Pengadilan	23 Agustus 2024

		Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah(LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan sengketa Ekonomi Syariah " yang diselenggarakan secara daring	27 September 2024
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama"Perlawanan Eksekusi"	15 November 2024
17	ANDI SUARDI, S. Ag.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Evaluasi Implementasi Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Dalam Rnagka Mewujudkan Kepastian dan Kesatuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama"	15 Maret 2024
		Bimtek Peningkatan Kompetensi tenaga teknis peradilan agama "Contra Legem" secara daring	17 Mei 2024
		Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "titik Singgung Penyelesaian Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan9LPS)"	26 Juli 2024
		Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga TEknis Peradilan Agama "Hukum Wakaf dalam putusan Pengadilan"	23 Agustus 2024
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Tata Kelola Syariah pada lembaga Keuangan Syariah(LKS)dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah(DPS),Relevansinya dengan sengketa Ekonomi Syariah"yang diselenggarakan secara daring	27 September 2024
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama" Perlawanan Eksekusi"	15 November 2024

Peningkatan kualitas SDM secara umum merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional, karena diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional, khususnya untuk PNS atau aparatur agar dicapainya kompetensi tertentu.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
SERTA TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Agama Watampone menerima DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : SP DIPA-005.01.2.307509/2024 tanggal 24 November 2023 sejumlah Rp 13.527.229.000,- (*tiga belas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*). Namun setelah revisi pengurangan Belanja Pegawai dan Belanja Sewa, anggaran menjadi Rp 8.750.924.000,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

Sedangkan untuk DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309076/2024 tanggal 24 November 2023 sejumlah Rp.181.642.000,- (*seratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*). Namun setelah revisi, anggaran menjadi Rp 134.804.000,- (*seratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat ribu rupiah*).

Selama tahun anggaran 2024 telah dilakukan revisi DIPA 307509 sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu :

- 1) Revisi I tanggal 15 Februari 2024 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 2) Revisi II tanggal 05 April 2024 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 3) Revisi III tanggal 07 Juni 2024 tentang penambahan ABT.
- 4) Revisi IV tanggal 10 Juli 2024 tentang perubahan RPD.
- 5) Revisi V tanggal 19 Agustus 2024 tentang penarikan anggaran belanja 51.
- 6) Revisi VI tanggal 04 Oktober 2024 tentang perubahan RPD.
- 7) Revisi VII tanggal 28 Oktober 2024 tentang perubahan pengurangan Rumah Dinas Hakim.
- 8) Revisi VIII tanggal 04 Desember 2024 tentang perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap (penambahan anggaran belanja pegawai).

- 9) Revisi IX tanggal 11 Desember 2024 tentang pemutakhiran POK.
- 10) Revisi X tanggal 20 Desember 2024 tentang pemutakhiran POK.

Selama tahun anggaran 2024 telah dilakukan revisi DIPA 309076 sebanyak 5 (empat) kali yaitu :

- 1) Revisi I tanggal 18 Februari 2024 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 2) Revisi II tanggal 16 April 2024 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 3) Revisi III tanggal 01 Juni 2024 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 4) Revisi IV tanggal 12 Juli 2024 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 5) Revisi V tanggal 04 Oktober 2024 tentang perubahan RPD.
- 6) Revisi VI tanggal 29 Oktober 2024 tentang penarikan anggaran.

Program - program pada Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024 :

1. Program Dukungan Manajemen:

a. Belanja Barang Non Operasional

1. Pagu Rp.15.950.000,-
2. Realisasi Rp.15.950.000,-(100%)
3. Sisa Rp.0,-(0 %)

b. Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)

- 1) Pagu Rp.7.078.000.000,- (Setelah revisi)
- 2) Realisasi Rp.6.851.555.806,- (90,80%)
- 3) Sisa Rp.226.444.194,- (9,20%)

b. Belanja Barang (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)

- Pagu Rp.1,656,974,000,- (Setelah revisi)
- Realisasi Rp.1,656.937.904,- (100%)
- Sisa Rp.36.096,- (0%)

Komponen yang terdapat pada program ini terdiri dari :

1. Komponen 051 (Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan) :
 - A. P4GN
 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya
 - Tes Urine Bebas Narkoba
 2. Komponen 001(Gaji dan Tunjangan)
 3. Komponen 002 (Operasional dan Pemeliharaan Kantor):

A. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran:

1) Belanja Keperluan Perkantoran

- Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor
- Biaya Penjilidan/Cetak/Cek
- Jasa Satpam, Supir dan Pramubakti
- Langganan Surat Kabar
- Air Minum/Galon
- Pajak Kendaraan Dinas

2) Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

- Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran

B. Langganan Daya dan Jasa:

1) Belanja Keperluan Perkantoran

- Langganan Internet

2) Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

3) Langganan Telepon

4) Langganan Air (PDAM)

5) Belanja Sewa (Sewa Web Hosting)

C. Pemeliharaan Kantor:

1) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor
- Pemeliharaan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Pos Jaga
- Pemeliharaan Pagar Gedung
- Pemeliharaan Gedung Tempat Ibadah

2) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan Rumah Dinas
- Pemeliharaan Halaman Rumah Dinas

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- Pemeliharaan Printer
- Pemeliharaan P.C.
- Pemeliharaan Laptop/Notebook
- Pemeliharaan Server

- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
- Pemeliharaan A.C. Split
- Pemeliharaan CCTV

D. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional:

- 1) Belanja Keperluan Perkantoran : Pakaian Dinas CPNS, Pakaian Dinas Pegawai non Hakim, Pakaian Kerja Satpam, Pengemudi dan Pramubakti.
- 2) Belanja Honor Operasional Satuan Kerja : Honor Pengelola PNBP, Honor Bendahara Pengeluaran, Honor PPSPM, Honor KPA, Honor Staf Pengelola Keuangan.

E. Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim :

- 1) Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim

F. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan :

- 1) Bahan/Spanduk/Dokumentasi
- 2) Bahan/Spanduk/Dokumentasi

G. Rapat Koordinasi Internal

- 1) Kudapan/Snack

H. Konsultasi ke Tingkat Banding

- 1) Perjalanan Dinas Biasa

I. Konsultasi ke KANWIL / KPKNL

- 1) Perjalanan Dinas Biasa

J. Konsultasi Ke Pusat :

- 1) Perjalanan Dinas Biasa

Pelaksanaan anggaran tahun 2024 DIPA 307509 secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan rencana, tetapi karena adanya sisa anggaran Belanja Pegawai, dan akun tersebut tidak bisa digeser ke akun lain sehingga realisasi anggaran secara keseluruhan sebesar 97,41%.

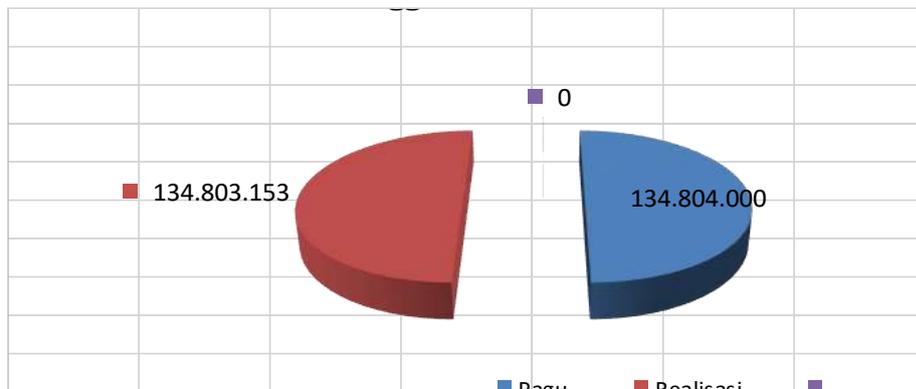
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Belanja Barang DIPA BADILAG / 309076)

Program penegakan dan pelayanan hukum ini hasilnya adalah terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama Watampone.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah pemberian bantuan pembebasan biaya perkara, operasional Pos Bantuan Hukum, pelaksanaan sidang diluar gedung dan sidang pelayanan terpadu.

Tabel 4.1
Rincian Anggaran DIPA 309076 Tahun 2024

No	Sub Output	Pagu	Realisasi	Sisa
1	Pos Bantuan Hukum	Rp70.000.000,-	Rp69.999.153,-	Rp847,-
2	Pembebasan Biaya Perkara	Rp20.558.000,-	Rp20.558.000,-	0,-
3	Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Rp20.552.000,-	Rp20.552.000,-	0,-
4	Layanan Sidang Terpadu	Rp23.694.000,-	Rp23.694.000,-	0,-
	Total	Rp134.804.000,-	Rp 134.803.153,-	Rp847,-



Gambar 4.1
Diagram Realisasi Anggaran DIPA Satker 309076

Adapun Belanja Barang dari DIPA 309076 berhasil mencapai realisasi sebesar 99,94%, dimana penyerapan anggaran untuk pelaksanaan perkara prodeo melebihi target (35 perkara), yaitu 89 perkara. Kegiatan Sidang Diluar Gedung sebanyak 17 kegiatan dan Sidang Pelayanan Terpadu yang ditargetkan sebanyak 8 kegiatan berhasil terlaksana semua, serta Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Kendaraan Dinas

Ada dua jenis kendaraan dinas Pengadilan Agama Watampone, yakni kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Total nilai aset kendaraan dinas jika dinilai dengan hitungan rupiah pada tahun 2024 adalah **Rp455.024.828** (*empat ratus lima puluh lima juta dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*).

Tabel 4.2
Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Watampone

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Kijang Innova	2007	√			
2.	Kijang Avanza	2011	√			
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Suzuki Shogun Racing FD 125 XRM	2006		√		
2.	Suzuki Tunder EN 125	2006			√	
3.	Yamaha Jupiter MX 286	2007		√		
4.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008		√		
5.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008		√		
6.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008		√		
7.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008		√		
8.	Suzuki Shogun R FL 125 SD	2009		√		

2. Rumah Dinas

Rumah dinas Pengadilan Agama Watampone yang berdiri di atas tanah seluas 1.308 M² merupakan gedung / kantor lama yang telah dilalih fungsikan menjadi rumah dinas.

Tabel 4.3
Rumah Dinas Pengadilan Agama Watampone

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2.	Rumah Dinas Panitera	1	√			
3.	Rumah Dinas Sekretaris	1	√			

Tanah Bangunan Rumdis seluas	1.308 M2	Rp. 1.406.704.000
Rumah Dinas	449 M2	Rp. 720.981.000
Nilai aset (dalam rupiah)		Rp. 2.127.685.000

Total nilai aset rumah dinas (beserta tanahnya) Pengadilan Agama Watampone jika dinilai dengan hitungan rupiah adalah **Rp 2.127.685.000,-** (*dua milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

3. Bangunan Gedung Kantor

Gedung Pengadilan Agama Watampone yang sekarang ini, diresmikan pada tanggal 27 Agustus 2008 oleh DR. H.A. Harifin Tumpa, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI saat itu. Gedung tersebut dibangun di atas tanah seluas 3.424 M² dan telah resmi ditempati sejak peresmian.

Tabel 4.4
Matrik Bangunan Gedung Pengadilan Agama Watampone

No	Sarana	Jumlah	Ket.
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	3	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Utama	1	
7	Ruang Sidang Umum	2	
8	Ruang Kepaniteraan	1	
9	Ruang ATK Perkara	1	
10	Ruang Kesekretariatan	1	
11	Ruang Bendahara	1	
12	Ruang Arsip Kesekretariatan	1	
13	Ruang Pusat PTSP	1	
14	Ruang Panitera Pengganti	1	
15	Ruang Mediasi	1	
16	Ruang Media Center	1	
17	Ruang Perpustakaan	1	
18	Ruang Juru Sita	1	
19	Ruang Arsip Perkara	1	

20	Ruang Laktasi	1	
21	Toilet Umum	5	
22	Ruang Tunggu Persidangan	1	
23	Ruang Posbakum	1	
24	Ruang TI	1	
25	Pos Keamanan	2	
26	Mushollah	1	
27	Tempat Parkiran	2	
	Jumlah	36	

Tanah Bangunan Kantor seluas	3.424 M2	Rp. 3.832.124.000
Gedung dan Bangunan Kantor	1.823 M2	Rp. 6.115.138.100
Nilai aset (dalam rupiah)		Rp. 9.947.262.100

Total nilai aset Bangunan Gedung Kantor (beserta tanahnya) Pengadilan Agama Watampone jika dinilai dengan hitungan rupiah adalah **Rp 9.947.262.100,-** (*sembilan milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah*).

4. Sarana / Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran

Total nilai aset sarana / prasarana gedung kantor Pengadilan Agama Watampone jika dinilai dengan hitungan rupiah adalah **Rp 2.425.590.069,-** (*dua milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah*).

Rincian jumlah sarana dan prasarana Pengadilan Agama Watampone dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Matrik Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran
Pengadilan Agama Watampone

No	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	B	RR	RB	Keterangan
1	Lemari Besi/Metal	69	69	-	-	
2	Lemari kayu	6	5	1	-	
3	Rak Besi	1	1	-	-	
4	Rak kayu	2	-	2	-	

5	Filling Kabinet Besi	1	1	-	-	
6	Brandkas	2	2	-	-	
7	Tabung Pemadam	5	5	-	-	
8	CCTV	1	1	-	-	
9	Papan Visual	4	3	1	-	
10	Mesin Antrian	1	1	-	-	
11	Mesin Absensi	1	1	-	-	
12	Perkakas Kantor Lainnya	1	1	-	-	
13	Meja kerja kayu	71	71	-	-	
14	Kursi Besi/Metal	168	167	-	1	
15	Kursi Kayu	12	-	12	-	
16	Sice	5	4	1	-	
17	Meja Rapat	2	2	-	-	
18	Meja Telpon	1	1	-	-	
19	Meja Resepsionis	2	2	-	-	
20	Sketsel	2	2	-	-	
21	Kursi Tunggu	7	7	-	-	
22	Mesin Pemotong Rumput	1	1	-	-	
23	Lemari Es	6	6	-	-	
24	A.C. Split	19	15	4	-	
25	Kipas Angin	1	1	-	-	
26	Kompore Gas	1	-	1	-	
27	Tabung Gas	1	1	-	-	
28	Televisi	6	6	-	-	
29	Loudspeaker	4	4	-	-	
30	Microfon	7	7	-	-	
31	Standing Bracket TV	1	1	-	-	
32	Taplak Meja	1	1	-	-	
33	Audio Mixing	1	1	-	-	
34	LCD Monitor	1	1	-	-	
35	Camera Conference Webcam	1	1	-	-	
36	Lambang Garuda Pancasila	2	-	2	-	
37	Gambar Presiden/Wapres	2	-	2	-	
38	Tiang Bendera	6	6	-	-	
39	Tangga Aluminium	1	1	-	-	
40	Kaca Hias	6	6	-	-	
41	Mimbar/Podium	1	1	-	-	
42	Palu Sidang	2	-	2	-	
43	Lambang Instansi	1	1	-	-	
44	Gordyn/Kray	1	1	-	-	
45	Asbak Tinggi	4	4	-	-	
46	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	7	-	-	

47	Telephon (PABX)	1	1	-	-	
48	Pesawat Telepon	1	1	-	-	
49	Genset	1	1	-	-	
50	Komputer Jaringan Lainnya	1	1	-	-	
51	P.C. Unit	33	33	-		
52	Laptop	33	33	-	-	
53	Printer	9	8	1		
54	Scanner	4	4	-	-	
55	Server	2	2	-	-	
56	Router	3	3	-	-	
57	Rak Server	2	2	-	-	
58	Kabel UTP	3	3	-	-	
59	Wireless Access Point	2	2	-	-	
60	Switch	6	6	-	-	
61	Monografi	444	235	209	-	
62	Majalah	6	6	-	-	
63	Laporan	3	3	-	-	
64	Bahan Kartografi Lainnya	8	8	-	-	
	Jumlah	1.016	777	238	1	

Sarana / prasarana fasilitas kantor secara keseluruhan berjumlah 1.016 unit, dengan rincian 777 unit dalam kondisi baik, dan 238 unit rusak ringan dan 1 rusak berat.

a. Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Agama Watampone tidak mendapat alokasi anggaran pengadaan BMN.

b. Pemeliharaan

Pada Tahun 2024 Pengadilan Agama Watampone mendapat anggaran untuk belanja biaya pemeliharaan, berupa :

- 1) Peralatan dan mesin yang meliputi : pemeliharaan kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, komputer/PC, AC, CCTV, server, genset, laptop/notebook, dan printer.
- 2) Pemeliharaan gedung dan bangunan, meliputi : pemeliharaan gedung kantor, halaman gedung kantor, pagar gedung, pos jaga, gedung tempat ibadah.

- 3) Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya meliputi : pemeliharaan rumah dinas, dan halaman rumah dinas.

Total aset barang milik negara tahun anggaran 2024 dalam hitungan rupiah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Total Aset Negara di Pengadilan Agama Watampone dalam Rupiah

No	Nama Aset	Nilai (Rp)
1	Tanah	5.238.828.000,-
2	Peralatan Dan Mesin	2,836,407,068,-
3	Gedung dan Bangunan	7.799.644.100,-
4	Aset Tetap Lainnya	15.354.679,-
5	Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.512.960.154,-)
6	Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.267.931.930,-)
7	Barang Komsumsi	1.188.000,-
8	Barang Pemeliharaan	54.000,-
Jumlah		12.110.583.763,-

Dari tabel di atas, terlihat bahwa total aset negara di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2024 setelah penyusutan adalah **Rp 12.110.583.763,-** (*dua belas milyar seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*).

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi e-Court

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, maka setiap pengadilan wajib menggunakan e-Court dalam penerimaan perkara. Aplikasi

e-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan Pengadilan Agama Watampone, dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online.

Ruang Lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan *effort* atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui aplikasi e-Court yang dapat diperoleh adalah :

- 1) Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen tersarisip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

c. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual, dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika setuju, maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan, dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

d. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

Pada e-Litigasi ini, acara persidangan secara elektronik oleh para pihak, dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim, yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim, kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

Tabel 4.7
Matrik Keadaan Perkara e-Court pada Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Watampone Tahun 2024

No	Kategori Perkara	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara
1	Gugatan	17	612	566	46
2	Permohonan	-	288	201	201

	Total	17	900	267	247
--	-------	----	-----	-----	-----

Sisa perkara e-Court tahun 2023 sebanyak 17 perkara, dan semuanya sudah diputus. Pada tahun 2024, sebanyak 900 perkara e-Court yang masuk / diterima, tetapi hanya 10 perkara melalui e-Litigasi.

Tabel 4.8
Tahapan Perkara Melalui e-Litigasi Tahun 2024

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Tahapan Terakhir
1	254/Pdt.G/2024/PA.Wtp	01-03-2024	Putus : 04-06-2024
2	422/Pdt.G/2024/PA.Wtp	07-05-2024	Putus : 20-08-2024
3	454/Pdt.G/2024/PA.Wtp	16-05-2024	Putus : 14-10-2024 Proses Banding
4	521/Pdt.G/2024/PA.Wtp	06-06-2024	Putus : 02-09-2024
5	575/Pdt.G/2024/PA.Wtp	25-06-2024	Putus : 14-10-2024
6	667/Pdt.G/2024/PA.Wtp	19-07-2024	Putus : 11-12-2024
7	835/Pdt.G/2024/PA.Wtp	12-09-2024	Putus : 02-12-2024
8	859/Pdt.G/2024/PA.Wtp	18-09-2024	Proses Persidangan
9	942/Pdt.G/2024/PA.Wtp	11-10-2024	Proses Persidangan
10	1026/Pdt.G/2024/PA.Wtp	05-11-2024	Proses Persidangan

2. Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Aplikasi SIPP merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara, baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan. SIPP memungkinkan akses terhadap berkas arsip perkara. Masyarakat dapat secara langsung mengakses dan mencari subjek perkara.

Kemudahan penyediaan informasi perkara tidak terlepas dari peran aplikasi SIPP yang telah terintegrasi dengan website Pengadilan Agama Watampone, sehingga informasi perkara yang sangat dibutuhkan seperti progres suatu perkara, jadwal sidang, dan informasi status perkara dapat diperoleh dengan mudah.

Aplikasi SIPP telah dimanfaatkan secara optimal oleh Pengadilan Agama Watampone, mulai dari pendaftaran perkara, pembuatan PMH (Penunjukan Majelis Hakim), Penetapan Hari Sidang, relas panggilan, keuangan perkara, pembuatan jadwal sidang, Berita Acara Sidang, hingga produk pengadilan (Putusan/Penetapan dan Akta Cerai).

Selain mengoptimalkan peran website yang terintegrasi dengan SIPP, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dengan SIPP adalah :

a. SMS Gateway

Pihak berperkara dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara praktis dengan mengirimkan SMS ke nomor yang telah disediakan dan akan mendapatkan balasan secara otomatis.

b. SIPANGGI (Sistem Informasi Panggilan Ghaib)

Pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dapat mengetahui informasi jadwal sidang.

c. SIPETTUNI (Sistem Informasi Pengubah Status Perkawinan)

aplikasi berbasis web yang dipergunakan untuk memudahkan para pihak pencari keadilan yang sudah mendapatkan akta cerai untuk mengubah status di KTP-nya.

d. SIPENGAMPU (Sistem Informasi Pengiriman Amar Putusan Pengadilan)

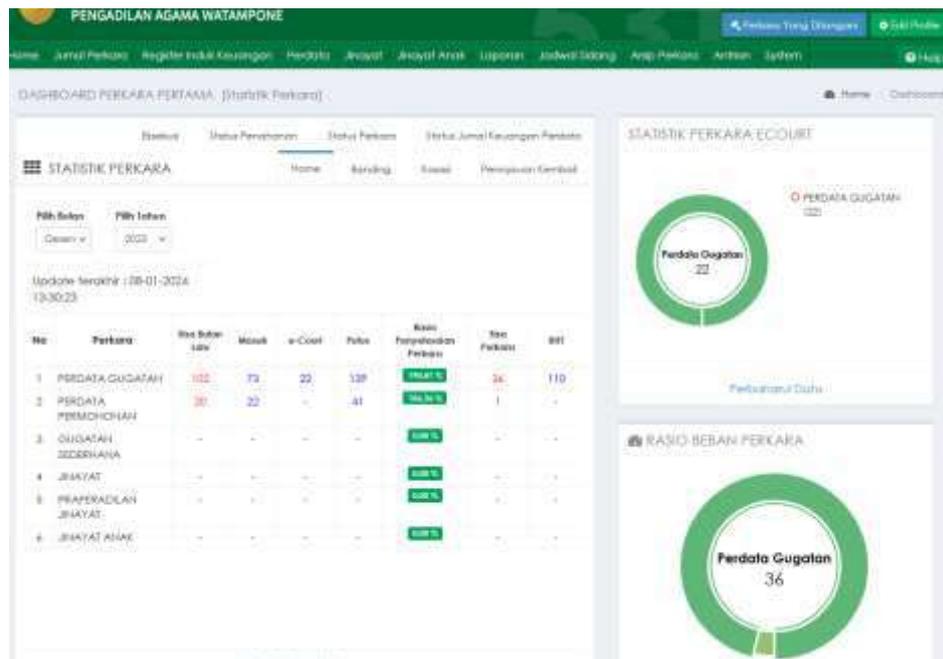
Sarana pengiriman Amar dan Salinan Putusan dalam bentuk digital yang diciptakan untuk mengirim Amar dan Salinan Putusan secara online kepada Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

e. Aplikasi Notifikasi Perkara (ATIKA)

Sarana pemberitahuan notifikasi seputar perkara untuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Pihak dengan mengirimkan pesan melalui whatsapp ke nomor yang terdaftar.

f. Aplikasi Layanan Informasi Virtual (ALIV)

Layanan whatsapp bot yang diperuntukan untuk masyarakat atau pihak berperkara agar dapat memperoleh informasi atau bertanya seputar informasi perkara. ALIV akan membalas secara otomatis jika pesan sesuai dengan format yang ditentukan.



Gambar 4.2
Tampilan Aplikasi SIPP Web Pengadilan Agama Watampone

Aplikasi SIPP yang terpasang di Pengadilan Agama Watampone sekarang adalah versi 5.1.0. Dengan diterapkannya aplikasi SIPP, maka publikasi perkara diharapkan dapat dilaksanakan secara *one day publish* yaitu perkara yang diproses pada hari itu dapat langsung dipublikasikan pada hari tersebut, serta minutasasi berkas perkara dalam satu hari (*one day minutation*).

Adapun beberapa strategi yang ditempuh dalam implementasi program *one day minutation* dan *one day publish* adalah sebagai berikut :

a. Penyeragaman Format

Penyeragaman format yang digunakan dari awal sampai akhir proses persidangan mutlak diperlukan, meliputi penyeragaman gaya selingkung format surat Gugatan atau Permohonan (penulisan identitas, posita dan petitum), penyeragaman template BAS dan Putusan / Penetapan.

b. Peran Aktif Petugas Meja I dan Meja II

Petugas Meja I adalah pintu masuk seseorang beracara di Pengadilan. Dimana ia bertugas untuk menerima gugatan atau permohonan seseorang. Untuk efisiensi dan efektifitas proses selanjutnya, Petugas Meja I harus

melakukan pemeriksaan terhadap data yang terdapat dalam surat gugatan atau permohonan yang diajukan.

Petugas Meja II merupakan pintu masuk data gugatan dan permohonan ke dalam aplikasi SIPP. Data yang *diinput* pertama kali, akan menentukan proses selanjutnya.

c. Adanya Koordinasi yang Baik antar Pihak Terkait dengan Perkara

Misalnya adanya koordinasi antara Penggugat atau Pemohon serta Kuasa Hukumnya, Petugas Meja I, Petugas Meja II, Jurusita/Jurusita Pengganti, Panitera/Panitera Pengganti, dan Majelis Hakim.

d. Mempersiapkan Segala Sesuatunya dari Awal Sebelum Perkara Diputus

Untuk mengejar target *one day minutation* dan *one day publish*, maka segala sesuatunya harus dipersiapkan sebelum persidangan dilakukan. Hal-hal seperti penyusunan jadwal sidang, penyusunan dan pengecekan berkas, pengecekan relaas panggilan, cetak instrumen panggilan atau instrumen pemberitahuan, pencetakan BAS sebelumnya, dan hal lainnya yang dibutuhkan, harus telah dipersiapkan sebelum sidang. Begitu juga dengan kegiatan yang pasti dilakukan setelah persidangan.



BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Pembangunan Zona Integritas

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 90 Tahun 2021, yang dimaksud dengan Zona Integritas (ZI) adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan public yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pengadilan sebagai Lembaga yang banyak berhubungan dengan pelayanan Publik/masyarakat pencari keadilan, hendaknya terus meningkatkan pelayanan. Pencari keadilan/pengguna jasa pengadilan yang datang saat ini, berbeda dengan mereka yang datang pada beberapa dasawarsa lalu. Kini mereka yang datang semakin terdidik dan menyadari hak-haknya. Oleh karena itu pelayanan professional sudah merupakan keharusan yang mesti diwujudkan, dan tidak realistis jika suatu pengadilan tanpa memberikan

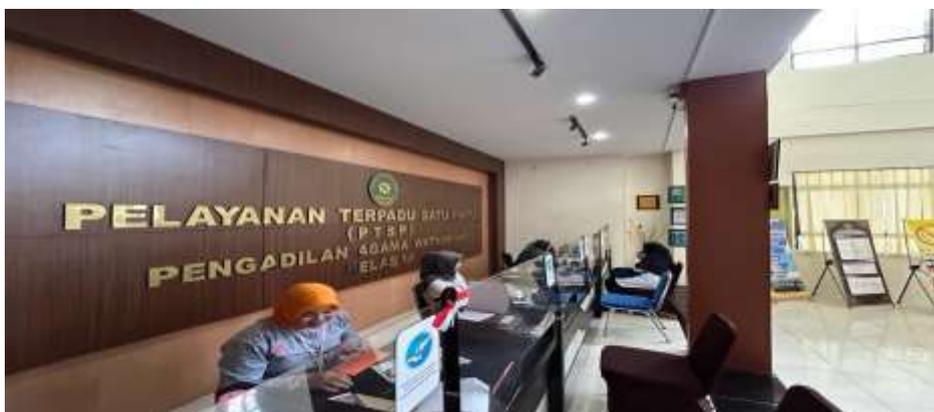
pelayanan yang terbaik, dan tanpa berusaha meminimalkan ketidakpuasan publik pencari keadilan.

Pengadilan Agama Watampone telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dengan mulai Pencanaan Zona Integritas pada bulan Maret 2019 dan telah mengajukan pengusulan setiap tahunnya s.d tahun 2024 namun belum mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

Proses yang dilalui oleh Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dimulai dari mempersiapkan dengan membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dan menyiapkan berbagai dokumen dianjurkan penilaian oleh Tim penilaian mandiri dari Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. Dengan melihat Rencana Pembangunan Zona Integritas yang telah dicanangkan, ada beberapa program pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain :

1. Pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas area proses mulai dari area 1 yakni Manajemen Perubahan hingga area 6 yakni peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Memasifkan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang berkaitan dengan pembangunan zona integritas sehingga seluruh aparatur Pengadilan Agama Watampone dapat secara konkrit bertindak dalam pengambilan keputusan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



Selain Pembangunan Zona Integritas, PTSP merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung, dan juga merupakan bagian dari penilaian Pembangunan Zona Integritas. Program ini mulai dikenalkan sejak tahun 2017 di beberapa pengadilan pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir di seluruh pengadilan Indonesia.

Berdasarkan surat keputusan Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara integritas dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan / pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu.

Program PTSP terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai peradilan Indonesia. Hal tersebut selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (*frontliner*) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal-hal yang bersifat koruptif.

Pada PTSP Pengadilan Agama Watampone telah ditempatkan petugas layanan di loket-loket, di mana para pihak pencari keadilan dapat meminta layanan dan informasi (Petugas PTSP tercantum dalam SK Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor: 141/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/II/2024). Bahkan juga telah ditempatkan petugas Bank BRI sebagai wujud layanan kepada masyarakat guna menerima panjar biaya perkara, sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot dan jauh untuk menyetor biaya panjar perkara ke bank.

Proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegritas. Pelayanan

administrasi terintegritas yang mudah, pasti, dan transparan dapat terwujud melalui PTSP.

Tujuan dari PTSP pada Pengadilan Agama :

- Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan
- Menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya

1. Layanan Pokok PTSP

a. Layanan Informasi / Pengaduan

1) Layanan Informasi

Petugas Informasi dibawah Penanggung jawab Panitera Muda Hukum, memberikan layanan informasi, baik secara prosedur biasa dan prosedur khusus, mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta melayani permohonan informasi, baik yang diajukan secara lisan atau tulisan.

2) Layanan Pengaduan

Petugas pengaduan melayani pengaduan, baik yang diajukan secara lisan atau tertulis.

a) Pengaduan secara Lisan :

- Menghadap langsung petugas Meja Pengaduan kantor Pengadilan Agama Watampone pada jam kerja, mulai pukul 08:00 s/d 16:30 WITA.
- Menyampaikan secara lisan permasalahan / pengalaman yang dialami sebenarnya (tidak fiktif).

b) Pengaduan secara tertulis :

- Menyampaikan / mengirim surat resmi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan cara :
 - Diantar langsung
 - Melalui Pos
 - Melalui Faximile (0481) 21018
 - Melalui E-mail: pawatampone1a@gmail.com

- Melalui aplikasi SIWAS MA RI

- Menyertakan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan untuk pengaduan secara tertulis.

b. Layanan Pendaftaran Perkara

Layanan Pendaftaran Perkara dilakukan oleh Petugas Pendaftaran yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja, dibawah Penanggung Jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Layanan Pendaftaran Perkara meliputi :

- 1) Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan tingkat pertama;
- 2) Penerimaan pengajuan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali;
- 3) Penerimaan Pendaftaran Permohonan Konsinyasi;
- 4) Penerimaan Pendaftaran Permohonan Eksekusi;
- 5) Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

c. Layanan Pembayaran Perkara

Layanan Pembayaran Perkara dilakukan oleh Petugas Pembayaran yang sebelumnya disebut sebagai Kasir, dibawah Penanggung Jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Layanan Pembayaran Perkara meliputi :

- 1) Penaksiran Panjar Biaya Perkara;
- 2) Pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
- 3) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 4) Pengembalian Sisa Panjar (PSP) Biaya Perkara;
- 5) Penyerahan bukti-bukti Pembayaran;
- 6) Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

d. Layanan Penyerahan Produk Pengadilan

Layanan Penyerahan Produk Pengadilan dilakukan oleh Petugas Produk Pengadilan, yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja III.

Layanan Penyerahan Produk Pengadilan meliputi :

- 1) Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan;
- 2) Penyerahan Akta Cerai;
- 3) Dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

2. Layanan Penunjang PTSP

a. Layanan Posbakum

Layanan Posbakum meliputi Konsultasi Hukum dan bantuan pembuatan Surat Gugatan atau Permohonan bagi Pencari Keadilan.

b. Layanan Penyetoran Panjar Biaya Perkara

Untuk sistem pembayaran biaya perkara, Pengadilan Agama Watampone telah melakukan MoU dengan Penyedia Jasa Eksternal, yaitu PT BRI Cabang Watampone dengan System Payment Point yang ada lingkungan PTSP itu sendiri.

c. Layanan Materai dan Legalisir atau Nazzeglen

Untuk sistem layanan materai dan legalisir atau nazzeglen, Pengadilan Agama Watampone telah melakukan MoU dengan Penyedia Jasa Eksternal yaitu PT POS Cabang Watampone.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Secara sederhana, pelayanan prima (*excellent service*) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan / masyarakat pengguna jasa Pengadilan Agama Watampone. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan / masyarakat.

Saat ini inovasi dan pemanfaatan teknologi menjadi keharusan sebagai alat penunjang pelayanan publik. Dukungan teknologi yang semakin berkembang serta masyarakat yang juga semakin modern dalam

menggunakan media elektronik, memacu Pengadilan Agama Watampone melakukan terobosan inovasi pelayanan publik.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan peningkatan kinerja bagi pegawai Pengadilan Agama Watampone, maka berikut ini beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut :

1. SIPETTUNI (Sistem Informasi Pengubah Status Perkawinan)

SIPETTUNI merupakan aplikasi berbasis web yang dipergunakan untuk memudahkan para pihak pencari keadilan yang sudah mendapatkan akta cerai untuk mengubah status di KTP-nya. Aplikasi ini dibuat untuk meningkatkan kinerja dengan sarana teknologi informasi sehingga memudahkan bagi para *stakeholder* yang terlibat dan mewujudkan pelayanan *one-day-service*. Aplikasi ini dibuat dari hasil kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.



Gambar 5.1
Tampilan Halaman Awal Aplikasi SIPETTUNI

Aplikasi ini terdiri dari halaman untuk pihak pencari keadilan, dan halaman untuk admin Dukcapil.


Form Permohonan Ubah Status Perkawinan
 Permohonan Khusus Pihak di Wilayah Pengadilan Agama Watampone

Nama Pemohon

Nomor Akta Cerai

[Kembali ke Halaman Utama](#)

Gambar 5.2
Tampilan Halaman untuk Pengguna


Selamat Datang
 Silahkan Log In untuk Melanjutkan

Email

Password

Captcha
 I'm not a robot 

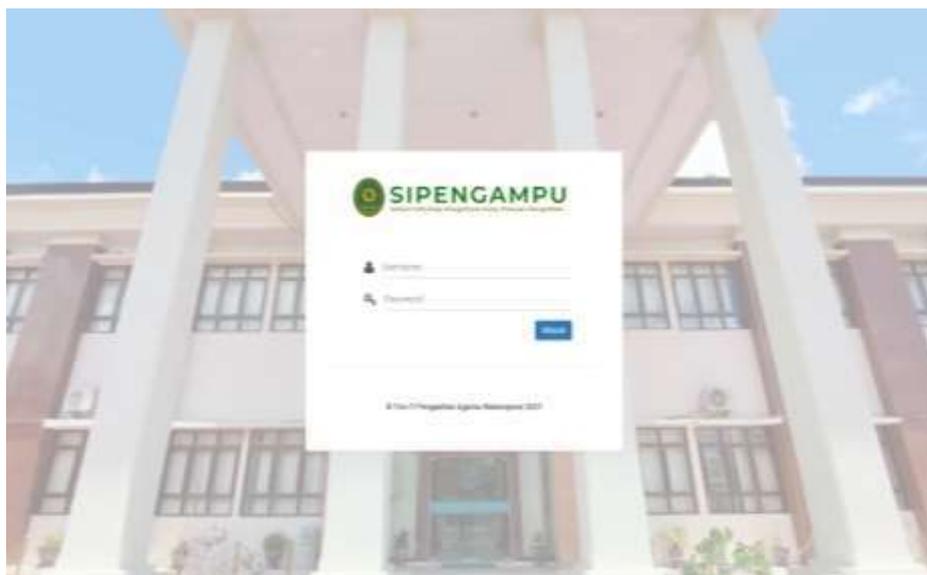
[Kembali ke Halaman Utama](#)

SIPETTUNI (Sistem Informasi Pengubah Status Perkawinan)
 Sebuah Aplikasi yang Dibuat dari Bentuk Kerjasama Antara
 Pengadilan Agama Watampone dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone
 Copyright © Tim IT PA Watampone 2022

Gambar 5.3
Tampilan Halaman untuk Admin

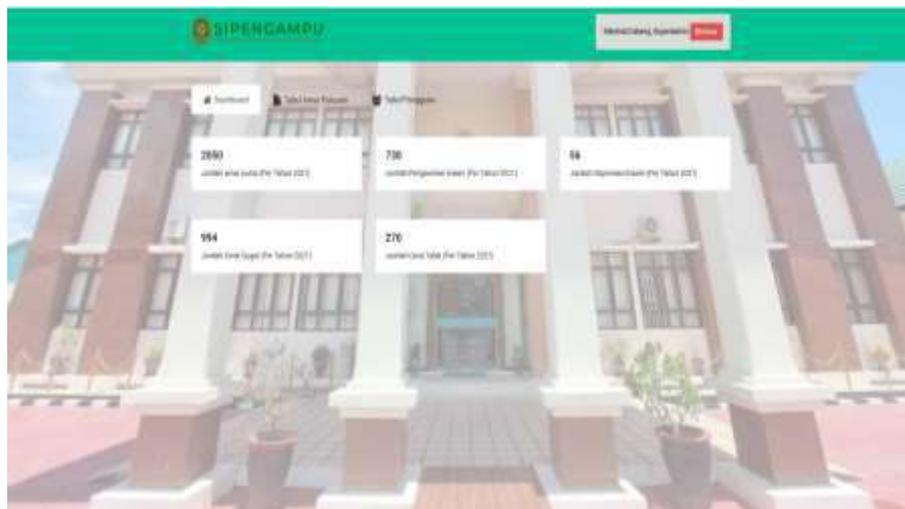
2. SIPENGAMPU (Sistem Informasi Pengiriman Amar Putusan Pengadilan)

SIPENGAMPU merupakan sarana pengiriman Amar dan Salinan Putusan dalam bentuk digital yang diciptakan untuk mengirim Amar dan Salinan Putusan secara online kepada KUA (Kantor Urusan Agama) dan Dinas DUKCAPIL (Kependudukan dan Catatan Sipil) sesuai dengan hasil kerja sama yang telah terjalin dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU). Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan bagi KUA dan Dinas DUKCAPIL sebagai bahan validasi akta cerai dan putusan dari data perkara yang ada di Pengadilan Agama Watampone agar tidak terjadi penyalahgunaan dokumen seperti pemalsuan data dan lain sebagainya.



Gambar 5.4
Tampilan Halaman Login Aplikasi SIPENGAMPU

Aplikasi ini terdiri dari data jumlah perkara di Pengadilan Agama yang telah putus, baik cerai gugat, cerai talak, pengesahan nikah, dispensasi kawin maupun jenis perkara lainnya yang dapat dilihat atau diunduh oleh pihak KUA dan Dinas DUKCAPIL.



Gambar 5.5
Tampilan Halaman Dashboard SIPENGAMPU

Proses ini dimulai dengan pengambilan data dari Aplikasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Watampone yang diintegrasikan ke aplikasi SIPENGAMPU, dan selanjutnya dapat diakses oleh pihak KUA dan Dinas DUKCAPIL, sesuai dengan hak akses yang telah diberikan menurut user masing-masing.

SIPENGAMPU merupakan upaya terobosan perubahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengiriman Amar dan Salinan Putusan kepada KUA dan Dinas DUKCAPIL dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik, khususnya pada satuan kerja Pengadilan Agama Watampone. Karena mengingat ketika pengiriman Salinan Putusan masih dilakukan dengan cara manual, telah terjadi beberapa permasalahan adalah tidak adanya biaya pengiriman khusus, baik dari panjar biaya perkara maupun dari DIPA Pengadilan Agama Watampone, serta penggunaan waktu yang cukup lama, maka dengan terciptanya aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar sehingga kinerja institusi semakin lebih efektif dan efisien.

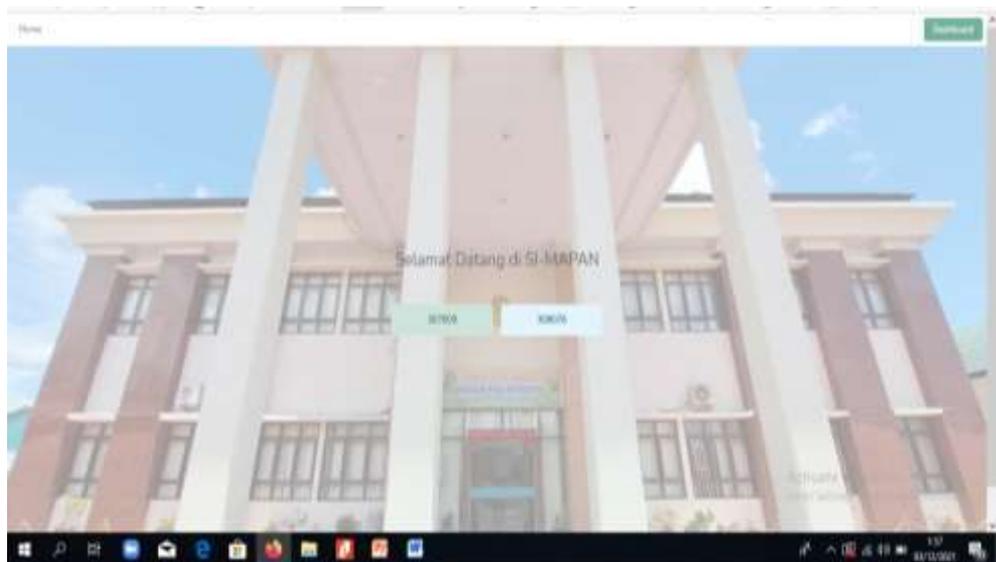
3. SI MAPAN

Aplikasi SI MAPAN menyediakan informasi tentang program rencana kegiatan dan realisasi pelaksanaan anggaran secara digital,

berbasis website dan dapat diakses oleh semua orang. Hal tersebut memberi kemudahan bagi Pimpinan / Pembuat Keputusan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran. Selain itu, Tim Pengelola DIPA juga mudah dalam mengontrol realisasi pelaksanaan anggaran bulan berjalan.

Walaupun aplikasi SI MAPAN tidak berdampak secara langsung terhadap pelayanan publik di Pengadilan Agama Watampone, tetapi SI MAPAN dapat memberikan dukungan layanan secara optimal terhadap pengelolaan anggaran.

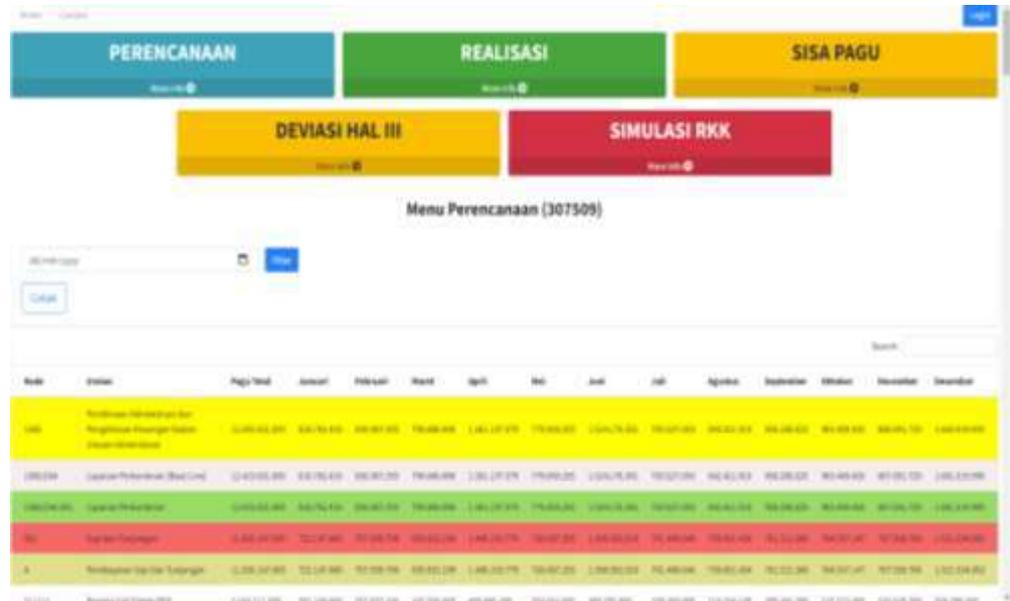
Aplikasi SI MAPAN dapat diakses pada url : simapan.pa-watampone.net. Aplikasi SI MAPAN terdiri dari 2 bagian utama, yaitu Home dan Login.



Gambar 5.6
Tampilan Bagian Home (Sebelum Login)

Bagian Home memungkinkan semua orang dapat mengakses informasi pengelolaan anggaran pada Pengadilan Agama Watampone. Pada bagian ini terdapat 2 tombol pilihan untuk menentukan data satker mana yang akan diakses, apakah 307509 untuk anggaran dari Badan Urusan Administrasi atau 309076 untuk anggaran dari Badan Peradilan Agama. Ketika kita pilih salah satu satker, maka akan muncul 5 menu

utama sesuai target tahapan implementasi, dimana menu perencanaan sebagai default.



Gambar 5.7
Tampilan Menu Perencanaan Satker 307509 (Dashboard)

Pada menu perencanaan, terdapat filter tanggal revisi untuk melihat program rencana kegiatan pelaksanaan anggaran tiap bulan secara detail. Dengan tombol download, kita dapat mendownload data tersebut dalam bentuk file PDF dan mencetaknya.

Untuk bagian utama lainnya, yaitu Login, digunakan oleh user untuk mengupdate data pengelolaan anggaran.



Gambar 5.8
Tampilan Dashboard (Setelah User Login)

4. KURSI PRIORITAS

Pada inovasi yang terdapat di Pengadilan Agama Watampone, khususnya di ruang tunggu telah tersedia kursi prioritas (priority seats) untuk masyarakat pencari keadilan khususnya untuk bagi kelompok rentan, seperti: penyandang disabilitas, ibu hamil, usia lanjut (lansia) dan ibu menyusui.



Gambar 5.9

Kursi Prioritas dan Space untuk Kursi Roda di Ruang Tunggu

Dengan tersedianya kursi prioritas (priority seats) diharapkan dapat membantu dan memberi kemudahan akses bagi kelompok rentan, yaitu dekat dengan meja layanan prioritas dan dekat diruang siding. Dan juga dapat memberi nilai plus bagi Pengadilan Agama Watampone karena telah tersedia fasilitas pendukung bagi kelompok rentan, dan dapat meningkatkan pelayanan bagi kelompok rentan.

5. AREA DROP ZONE DAN PARKIR KHUSUS DISABILITAS

Dalam upaya menerapkan pelayanan yang prima dan dapat memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas agar dapat menggunakan fasilitas di Pengadilan Agama Watampone dengan baik,

disediakan area drop zone dan parkir khusus disabilitas yang sesuai dengan anjuran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.



Gambar 5.10

Parkir Khusus Disabilitas

Area parkir khusus disabilitas ini berada dekat dengan akses masuk ke Gedung pelayanan di Pengadilan Agama Watampone dan bersebelahan dengan area drop zone agar memudahkan penyandang disabilitas memarkirkan kendaraannya ketika berada di Pengadilan Agama Watampone. Area parkir khusus disabilitas diberi warna biru dan symbol parkir khusus disabilitas agar pengunjung Pengadilan Agama Watampone yang bukan merupakan penyandang disabilitas tidak memarkirkan kendaraannya di area tersebut.



Gambar 5.11

Pojok Merokok

Pojok Merokok ini berada dekat dengan akses pintu masuk ke Gedung Kantor di Pengadilan Agama Watampone. Fasilitas Pojok Merokok ini diberikan bagi masyarakat/ para pencari keadilan selama berada di Pengadilan Agama Watampone, terasa nyaman karena berada di bawah pohon yang rindang, dan terasa teduh (tidak terasa panas).

6. LACAK PROSES TAHAPAN PERKARA

Aplikasi Lacak Proses Perkara adalah solusi modern yang memungkinkan pihak berperkara dan masyarakat untuk mengikuti

perkembangan perkara hukum mereka secara online. Aplikasi ini menyediakan informasi real-time tentang status perkara dan jadwal persidangan, memberikan transparansi yang lebih besar dalam proses hukum. Aplikasi ini membawa efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi, memperkuat hubungan antara Pengadilan Agama Watampone dan masyarakat.



Jadwal Sidang Terkini

7	2024-01-09		1265/Pdt.G/2023/PA.WTP
8	2024-01-09		1246/Pdt.G/2023/PA.WTP
9	2024-01-09	Ruang Sidang 1	1104/Pdt.G/2023/PA.WTP
10	2024-01-09		1255/Pdt.G/2023/PA.WTP
11	2024-01-09	Ruang Sidang 1	1275/Pdt.G/2023/PA.WTP
12	2024-01-09	Ruang Sidang 2	1314/Pdt.G/2023/PA.WTP
13	2024-01-09	Ruang Sidang 1	1336/Pdt.G/2023/PA.WTP
14	2024-01-09	Ruang Sidang 1	1309/Pdt.G/2023/PA.WTP

Butuh Bantuan?

Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan bantuan, silakan hubungi kami.

[Hubungi Kami di WA](#)

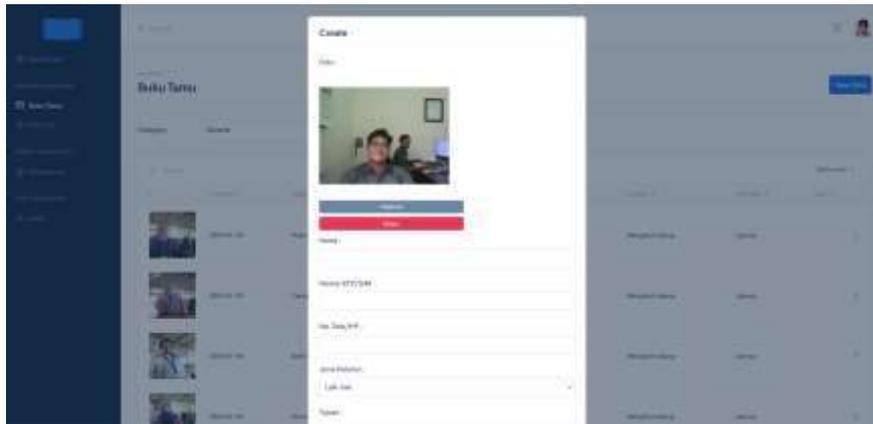
Log Pelacakan	
Nomor	10/Pdt.P/2024/PA/Wtp
Jenis	Pengesahan Perkawinan/Hubat Nikah
Status	Sidang pertama
26 Januari 2024	[Penetapan] - Sidang pertama
4 Januari 2024	[Penetapan] - Penetapan Hari Sidang Pertama
4 Januari 2024	[Penetapan] - Penunjukan Juruita
4 Januari 2024	[Penetapan] - Penunjukan Paritera Pengganti
4 Januari 2024	[Penetapan] - Penetapan Majelis Hakim/Hakim
4 Januari 2024	[Pendaftaran Perkara] - Pendaftaran Perkara

Gambar 5.11
Tampilan Halaman Lacak Proses Tahapan Perkara

7. BUKU TAMU DIGITAL

Aplikasi Buku Tamu Digital Pengadilan Agama Watampone adalah solusi modern untuk pencatatan kunjungan yang mengintegrasikan fitur kamera wajah. Aplikasi ini memudahkan pengunjung untuk *check-in* dengan cepat melalui pemindaian wajah, meningkatkan keamanan dan menyediakan data kunjungan yang akurat bagi pengelolaan pengadilan. Fitur ini juga memungkinkan pencatatan waktu kunjungan secara real-time, menjamin efisiensi dan transparansi proses penerimaan tamu.





Gambar 5.12
Tampilan Halaman Buku Tamu Digital

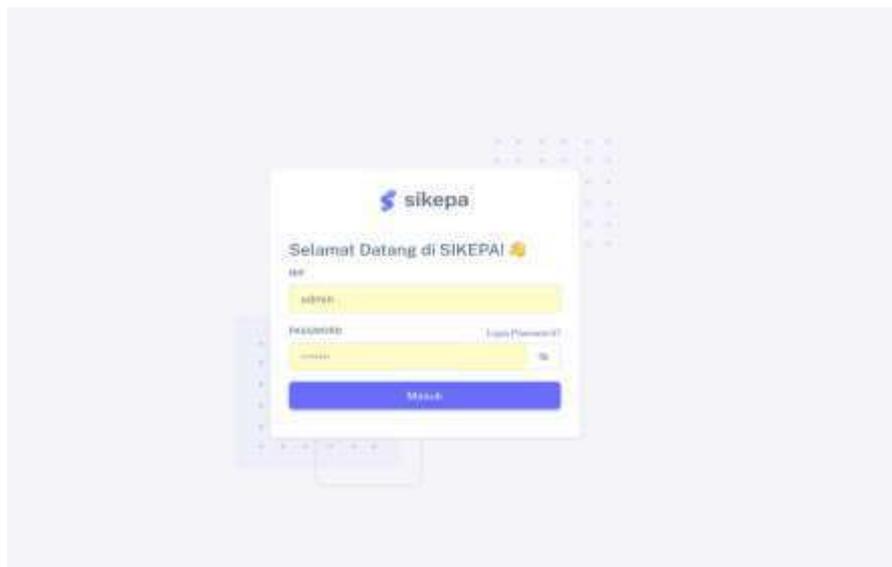
8. SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Sistem Administrasi Kepegawaian Pengadilan Agama Watampone adalah platform digital canggih yang dirancang untuk memodernisasi dan mempermudah pengelolaan administrasi kepegawaian. Sistem ini memiliki dua fitur utama yang sangat bermanfaat:

1. Fitur Izin Cuti Tahunan: Fitur ini memungkinkan pegawai untuk mengajukan cuti tahunan dengan mudah melalui portal online. Pegawai dapat memasukkan tanggal cuti, sementara sistem secara otomatis melacak sisa jatah cuti dan memperbarui catatan secara real-time. Manajemen dapat meninjau dan menyetujui permohonan cuti dengan cepat, memastikan proses yang efisien dan transparan.

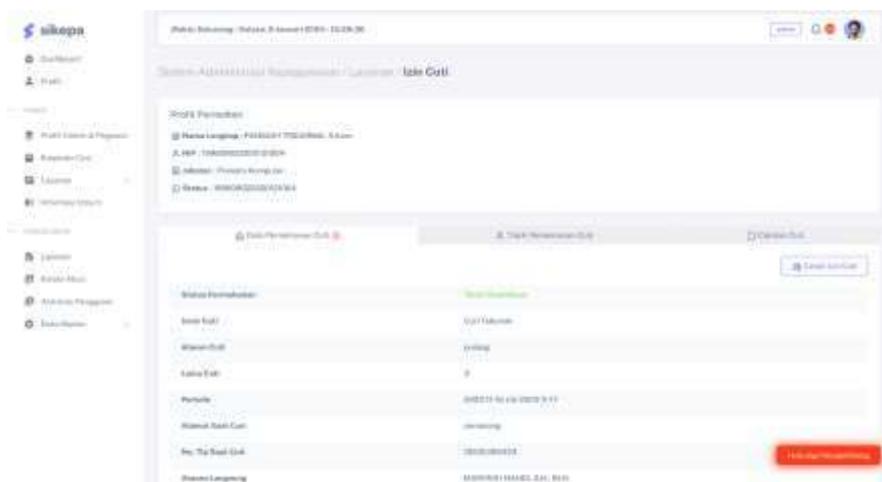
2. Fitur Penilaian Kinerja Pegawai: Fitur ini menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk menilai kinerja pegawai. Melalui sistem ini, manajer dapat menetapkan tujuan, memberikan umpan balik, dan melakukan penilaian secara periodik. Pegawai dapat mengakses evaluasi mereka, menerima umpan balik konstruktif, dan memantau perkembangan pribadi mereka. Sistem ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan profesional dan memastikan standar kinerja yang tinggi di seluruh organisasi.

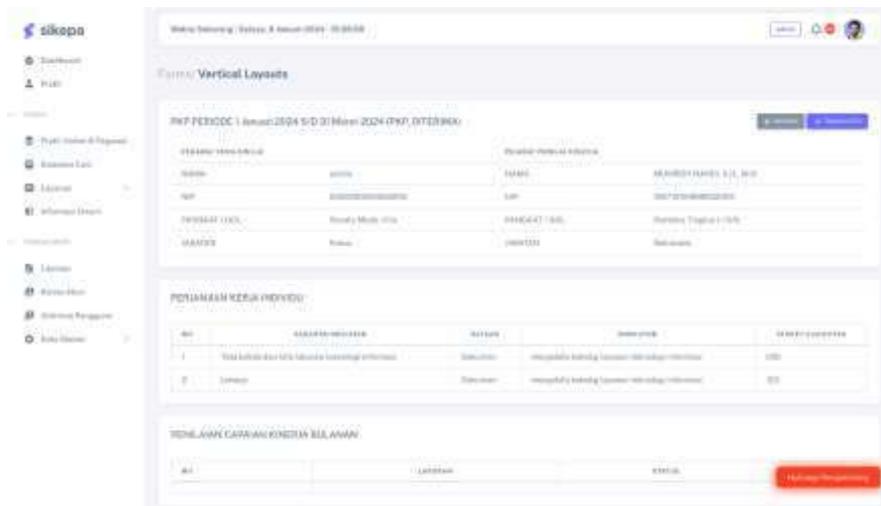
Dengan fitur-fitur ini, Sistem Administrasi Kepegawaian Pengadilan Agama Watampone berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan keterlibatan pegawai. Ini merupakan langkah besar menuju digitalisasi proses administratif dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kerja yang modern.



Gambar 5.13

Tampilan Login Sistem Administrasi Kepegawaian





Gambar 5.14
Sistem Administrasi Kepegawaian

9. STATISTIK DATA SIPP

Aplikasi Data Statistik SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Agama Watampone adalah inovasi yang memberikan kemudahan dalam mengumpulkan dan menganalisis data statistik perkara di Pengadilan Agama Watampone. Dengan menggunakan teknologi modern, SIPP membantu petugas pengadilan untuk menyajikan data statistik secara akurat dan real-time

No	Jumlah Perkara	Jumlah Gugat	Jumlah Putus
1. 2019	1	0	1
2. 2020	20	12	18
3. 2021	08	11	7
4. 2022	06	11	10
5. 2023	09	06	6
6. 2024	09	11	11

Kategori	Jumlah Pokok	Perwakilan	
		2023	2024
Rekamata			
Rekamata Karyawan	100	100	88
Rekamata Siswa	100	138	111
Rekamata Investigasi	140	100	41
Rekamata Kesehatan	100	100	90
Rekamata Biaya	100	100	49
Rekamata Kesehatan	40	0	6
Rekamata Lainnya	100	100	90
Rekamata Otu	100	100	98
Rekamata dan Rencan	100	100	88

Gambar 5.15
Tampilan Halaman Statistik Data SIPP



BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pengadilan Agama Watampone sebagai kawal depan peradilan, dalam melakukan pengawasan Internal berpedoman kepada :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan,
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan,
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan,
4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya,
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan keputusan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Watampone selaku pimpinan tertinggi pengadilan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai. Karena peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara sangat penting, pengawasan diperlukan untuk membina sikap dan perilaku disiplin, loyalitas, bertanggung jawab, jujur, dan

selalu mengembangkan sumber daya sehingga dapat meningkatkan kinerja yang mengarah pada peningkatan pelayanan masyarakat. Pengadilan Agama Watampone telah berupaya untuk mendukung peningkatan tersebut dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara terus-menerus terhadap hakim dan pegawai.

Pengawasan Internal di lingkungan Pengadilan Agama Watampone mencakup 3 (tiga) pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan Melekat oleh Atasan Langsung terhadap bawahannya masing-masing secara terus-menerus untuk preventif dan represif,
2. Pengawasan Fungsional dengan cara menunjuk Hakim Pengawas Bidang (HaWasBid) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor: 171/KPA.W2-A2/SK.PW1.1/XI/2024 tanggal 11 November 2024, yang meliputi berbagai bidang, sebagaimana terlampir dalam laporan ini.
3. Pengawasan teknis Yustisial bagi hakim dilakukan secara rutin melalui :
 - a. Eksaminasi Putusan
 - b. LKH (Laporan Kegiatan Hakim)

Pengawasan yang dilakukan HaWasBid untuk memastikan bahwa pelaksanaan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HaWasBid yang ditunjuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas yang diberikan. Hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Koordinator Pengawas, diteruskan ke pimpinan serta Hakim Tinggi Pengawas Daerah setiap bulan.

Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor : 171/KPA.W2-A2/SK.PW1.1/XI/2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Watampone :

**HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

NO	BIDANG PENGAWASAN	NAMA/ NIP	SEKRETARIS
	Koordinator Hakim Pengawas Bidang	Hadrawati, S.Ag., M.H.I. NIP. 19730131 199802 2 003	Abdul Muhaemin
1.	Manajemen Peradilan	Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. NIP. 19691124 199403 2 004	Zelvyana M. Amin Firdaus
2.	-Administrasi Perkara	Drs. M. Yunus K., S.H., M.H. NIP. 19611231 199103 1 014	Ahmad Amiruddin
3.	Administrasi Persidangan & Pelaksanaan Putusan	Drs. Dasri Akil, S.H. NIP. 19591231 198803 1 027	Iriani Muh. Haerul Huluk
4.	Administrasi Umum	Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. NIP. 19680511 199403 2 003	A. Ulfiyah Nur Satriani
5.	Kinerja pelayanan publik	Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. NIP. 19611002 198803 2 001	Dyta Nurul Yunus Hermawati

B. Evaluasi

Evaluasi kinerja dilakukan untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi kinerja digunakan untuk mengetahui posisi dan tingkat pencapaian sasaran, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan, sehingga dapat segera dilakukan penanganan yang terbaik terhadap sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan agar dapat tercapai dengan baik. Hasil evaluasi kinerja dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan oleh stakeholder di masa yang akan datang.

Evaluasi kinerja sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Watampone dalam bentuk rapat evaluasi menyeluruh setiap bulan. Adapun hasil evaluasi yang harus selalu menjadi perhatian adalah :

- Peningkatan kedisiplinan dalam kehadiran di kantor dan di saat jam kerja;
- Konsistensi penggunaan aplikasi SIPP bagi Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, Kasir dan user SIPP lainnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- Menjaga Kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja;
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
- Implementasi aplikasi e-Court dan 11 (sebelas) aplikasi Inovasi Ditjen Badilag;
- Peningkatan kinerja seluruh hakim dan pegawai sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
- Peningkatan ketepatan, kecermatan dan ketelitian dalam pembuatan laporan, dan pemberkasan perkara Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali.
- Akreditasi Penjaminan Mutu, Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);



BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat penyelesaian perkara secara keseluruhan tahun 2024 adalah 91,02%, dengan perhitungan perkara diterima tahun 2024 sejumlah 1822 perkara ditambah perkara sisa tahun 2023 sejumlah 37 perkara sehingga total perkara yang ditangani tahun 2024 sejumlah 1859 perkara dan berhasil diselesaikan sejumlah 1692 perkara. Sisa perkara yang belum diselesaikan tahun 2024 sejumlah 167 perkara (8,98 %).
2. Penyerapan anggaran DIPA Satker 307509 tahun 2024 sebesar 97,41 %. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan program Dukungan Manajemen telah dilaksanakan dengan baik;
3. Penyerapan anggaran DIPA Satker 309076 tahun 2024 sebesar 100 %. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan program Penegakan Dan Pelayanan Hukum telah dilaksanakan dengan baik;
4. Dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terbatas, Pengadilan Agama Watampone telah melaksanakan tugas peradilan sesuai ketentuan.

B. Rekomendasi

1. Sangat diperlukan peningkatan anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai penunjang agar Pengadilan Agama Watampone dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam melayani masyarakat pencari keadilan,
2. Perlu adanya pemberian reward dan promosi jabatan bagi hakim dan pegawai yang menunjukkan kinerja yang tinggi / baik,

3. Perlu adanya penambahan pegawai untuk :
 - a. Hakim,
 - b. Panitera Pengganti,
 - c. Juru Sita.
4. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan bagi hakim dan pegawai untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



**SK TIM PENYUSUN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**



**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR: 191/KPA.W20-A2/SK.OT.01.1/XII/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024;
b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3111/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021

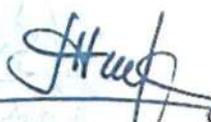
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A TAHUN 2024;**

- KESATU** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024;
- KEDUA** : Tugas Tim adalah :
- a. Menginventarisir dan menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari sub-sub Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam lingkungan unit kerja Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
 - b. Menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A Tahun 2024 sesuai outline;
 - c. Laporan dibuat dalam bentuk soft copy dan hard copy yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai jadwal yang ditetapkan.
- KETIGA** : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 18 Desember 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE


NURLINA K.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR : 191/KPA.W20-A2/SK.OT.01.1/XII/2024
TANGGAL : 18 Desember 2024

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Penanggungjawab: Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. (Ketua)
Koordinator : Hadrawati, S.Ag., M.H.I. (Wakil Ketua)
Ketua : Lukman Patawari, S.H. (Panitera)
Sekretaris : Zainuddin, S.Ag. (Sekretaris)
Anggota : Hayad Jusa, S.Ag. (Panitera Muda Hukum)
Andi Suardi, S.Ag. (Panitera Muda Gugatan)
Bintang, S.H. (Panitera Muda Permohonan)
Ninik Hartini Mansyur, S.H., M.H. (Kasubbag.
Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)
Saiful Bachri, S.H. (Kasubbag. Umum dan Keuangan)
Nanni, S.AN. (Plt. Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala)
Breend Benny Dharmawan (Klerek-Penalaah Teknis
Kebijakan)

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

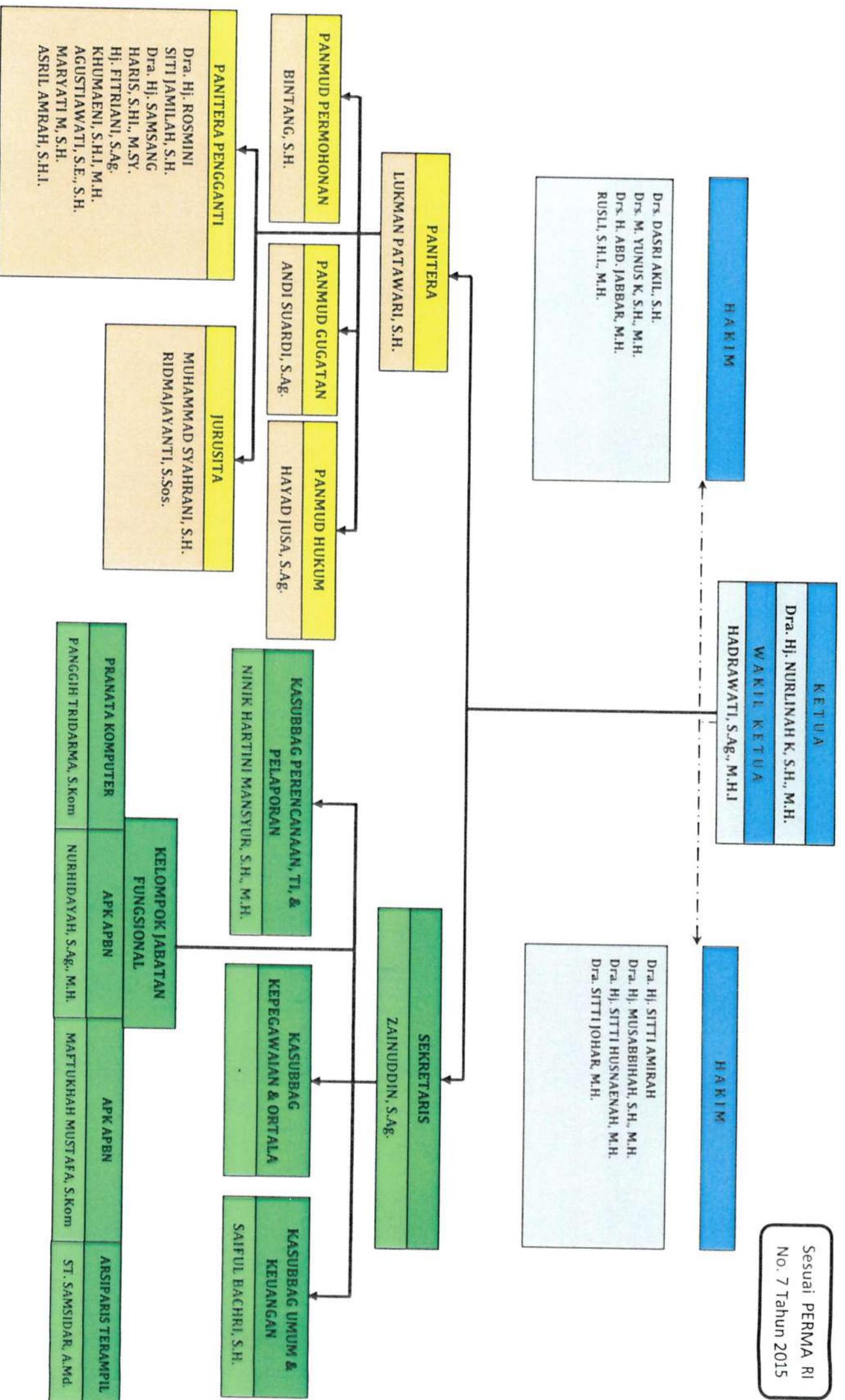

NURLINAH K.

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai PERMA RI
No. 7 Tahun 2015



Keterangan :

— Garis Komando

- - - - - Garis Koordinasi

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



DAFTAR BEZETTING

Data Bezetting Pegawai di Pengadilan Agama Watampone Tahun 2024

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR	
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dra. Nurlinah, K, S.H., M.H. 196712311994032020	Pembina Utama Madya IV/d	2022-10-01	00102/KEP/AA/1500 1/22	Ketua Pengadilan, Pengadilan Agama Watampone	2024-10-10	215/KMA/SK.KP4.1. 3/X/2024		S-2
2	Hadrwati, S.Ag., M.HI. 197301311998022003	Pembina Utama Muda IV/c	2022-04-01	00013/KEP/AA/1500 1/22	Wakil Ketua Pengadilan, Pengadilan Agama Watampone	2022-12-07	339/KMA/SK/XI/2022		S-2
3	Lukman Patawari, S.H. 196907181998031003	Pembina IV/a	2021-04-01	1152/DJA/KP.04.1/SK /3/2021	Panitera Tingkat Pertama, Panitera	2022-12-07	3062/DJA/KP.04.6/ SK/11/2022		S-1
4	Zainuddin, S.Ag. 197310152001121004	Pembina IV/a	2023-10-01	986/SEK/SK.KP.2.1.1/ IX/2023	Sekretaris, Sekretaris	2024-12-02	4420/SEK/SK.KP4.1. 3/XI/2024		S-1
5	Drs. Dasri Akil, S.H. 195912311988031027	Pembina Utama Madya IV/d	2018-10-01	00109/KEP/AA/1500 1/18	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Watampone	2019-05-28	74/KMA/SK/IV/2019		S-1
6	Drs. M. Yunus K., S.H., M.H. 196112311991031014	Pembina Utama Madya IV/d	2020-10-01	00072/KEP/AA/1500 1/20	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Watampone	2022-12-07	339/KMA/SK/XI/2022		S-2
7	Drs. Abd Jabbar, M.H. 196408201991031004	Pembina Utama Madya IV/d	2022-04-01	00020/KEP/AA/1500 1/22	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Watampone	2024-10-10	215/KMA/SK.KP4.1. 3/X/2024		S-2
8	Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.	Pembina Utama	2022-10-01	00094/KEP/AA/1500	Hakim Tingkat	2023-09-	174/KMA/SK/IX/20		S-2

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	196805111994032003	Madya IV/d	4	1/22	Pertama, Pengadilan Agama Watampone	12	23	9
9	Dra. Sitti Husnaenah, M.H. 196911241994032004	Pembina Utama Madya IV/d	2022-04-01	00020/KEP/AA/1500 1/22	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Watampone	2023-02- 21	24/KMA/SK/II/2023	S-2
10	Dra.Hj. Sitti Amirah, M.H 196602121994012001	Pembina Utama Madya IV/d	2022-03-16	00022/KEP/AA/1500 1/22	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Watampone	2020-08- 31	181/KMA/SK/VII/20 20	S-2
11	Dra. Sitti Johar, M.H. 196607211994032002	Pembina Utama Madya IV/d	2022-10-01	00119/KEP/AA/1500 1/22	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Watampone	2022-08- 29	248/KMA/SK/VIII/2 022	S-2
12	Rusli, S.H.I., M.H. 198103062007041001	Pembina IV/a	2022-10-01	2323/DJA/KP.04.1/9/ 2022	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Watampone	2024-10- 10	215/KMA/SK.KP4.1. 3/X/2024	S-2
13	Hayad Jusa, S.Ag. 196708011992031003	Penata Tingkat I III/d	2016-10-01	2766/DJA/KP.04.1/SK /08/2016	Panitera Muda, Panitera Muda Hukum	2022-07- 25	1385/DJA/KP.04.6/ SK/7/2022	S-1
14	Bintang, S.H. 197009121992031004	Penata Tingkat I III/d	2012-10-01	392/SEK/KP.01/SK/9/ 2012	Panitera Muda, Panitera Muda Permohonan	2020-11- 03	2140/DJA/KP.04.6/ SK/9/2020	S-1
15	Andi Suardi, S. Ag. 197311052001121001	Penata Tingkat I III/d	2014-04-01	0324/DJA/KP.04.1/SK /II/2014	Panitera Muda, Panitera Muda Gugatan	2022-08- 15	1960/DJA/KP.04.6/ SK/7/2022	S-1

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT				JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16	Ninik Hartini Mansyur, S.H., M.H. 198102052009012005	Pembina IV/a	2023-10-01	989/SEK/SK.KP.2.1.1/I X/2023	Kepala Subbagian, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	2023-05-04	526/SEK/Kp.I/SK/V/ 2023	S-2	
17	Saiful Bachri, S.H. 198411292012121003	Penata III/c	2021-04-01	W20- A/108/KP.04.1/SK/III/ 2021	Kepala Subbagian, Subbagian Umum dan Keuangan	2024-11-08	4420/SEK/SK.KP.4.1. 3/XI/2024	S-1	
18	Harris, S.H.I., M.Sy. 197304051998031004	Pembina IV/a	2020-10-01	1479/DJA/KP.04.1/SK /9/2020	Panitera Pengganti, Panitera	2017-11-16	1388/DJA/KP.04.6/ SK/10/2017	S-2	
19	Dra. Rosmini, 196704121994032002	Penata Tingkat I III/d	2006-04-01	UP.IV/1651/SEK/SK2 006	Panitera Pengganti, Panitera	2011-05-05	0605/DJA/KP.04.6/ SK/III/2011	S-1	
20	Siti Jamila, S.H. 196707282000122001	Penata Tingkat I III/d	2013-04-01	0499/DJA/KP.04.1/SK /II/2013	Panitera Pengganti, Panitera	2013-08-23	0997/DJA/KP.04.6/ SK/V/2013	S-1	
21	Fitriani, S.Ag. 197410172001122002	Penata Tingkat I III/d	2014-04-01	0327/DJA/KP.04.1/SK /II/2014	Panitera Pengganti, Panitera	2021-05-31	1685/DJA/KP.04.6/ SK/5/2021	S-1	
22	Dra. Samsang, 196801012003122002	Penata Tingkat I III/d	2019-04-01	311 Tahun 2019	Panitera Pengganti, Panitera	2016-11-29	3188/DJA/Kp.04.6/ SK/10/2016	S-1	
23	Naimah Nurdin, Lc., S.HI., M.Th.I. 198209182009122003	Penata Tingkat I III/d	2022-04-01	1018/DJA/KP.04.1/SK /3/2022	Panitera Pengganti, Panitera	2020-03-16	851/DJA/KP.04.6/S K/II/2020	S-2	
24	Khumaeni, S.H.I., M.H. 197901042009121001	Penata Tingkat I III/d	2022-04-01	1038/DJA/KP.04.1/SK /3/2022	Panitera Pengganti, Panitera	2024-11-08	1748/DJA/SK.KP.4.1. 3/X/2024	S-2	
25	Maryati M, S.H. 1986012320121222004	Penata III/c	2021-04-01	892/DJA/KP.04.1/SK/ 2/2021	Panitera Pengganti, Panitera	2022-07-25	1968/DJA/KP.04.6/ SK/7/2022	S-1	

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Asril Amrah, S.H.I. 198910222012121001	Penata III/c	2021-04-01	906/DJA/KP.04.1/SK/ 2/2021	Panitera Pengganti, Panitera	2023-03- 21	1068/DJA/KP.04.6/ SK/3/2023	S-1
27	Agustiawati, S.E., S.H. 198308082014082001	Penata Muda Tingkat I III/b	2020-10-01	1702/DJA/KP.04.1/SK /9/2020	Panitera Pengganti, Panitera	2023-03- 21	1105/DJA/KP.04.6/ SK/3/2023	S-1
28	Nurhidayah, S.Ag., M.H. 197807052002122001	Pembina IV/a	2018-04-01	443/SEK/Kp.I/SK/VII/2 019	Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Sekretaris	2024-08- 07	3657/SEK/SK.KP4.1. 3/VIII/2024	S-2
29	Muhammad Syahrani, S.H. 197301012006041019	Penata Tingkat I III/d	2023-10-01	176/KMA/SK/IX/2023	Juru Sita, Panitera	2016-08- 09	1907/DJA/KP.04.6/ SK/07/2016	S-1
30	Andi Muhammad Amin, S.H.I. 197706052009121002	Penata Tingkat I III/d	2022-04-01	A/96/KP.04.1/SK/III/2 022	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan	2023-10- 02	1098/SEK/SK.KP3.4. 5/X/2023	S-1
31	Maftukhah Mustafa, S.Kom. 198603242011012014	Penata Tingkat I III/d	2021-04-01	W20- A/115/KP.04.1/SK/III/ 2021	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Sekretaris	2023-04- 27	475/SEK/Kp.I/SK/IV /2023	S-1
32	Ridmajayanti, S.Sos. 199007092009122001	Penata III/c	2023-04-01	540/DJA/KP.04.1/SK/ 2/2023	Juru Sita, Panitera	2016-08- 09	1905/DJA/KP.04.6/ SK/07/2016	S-1
33	Pangkih Tridarma, S.Kom. 199609022020121004	Penata Muda Tingkat I III/b	2024-08-01	121/KPTA/SK.KP2.1.1 /VII/2024	Pranata Komputer Ahli Pertama, Sekretaris	2022-08- 26	1004/SEK/Kp.I/SK/IV III/2022	S-1
34	Breend Benny Dharmawan, S.E., M.M. 199008052022031004	Penata Muda Tingkat I III/b	2024-08-01	129/KPTA/SK.KP2.1.1 /VII/2024	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Subbagian Perencanaan, Teknologi	2023-10- 02	1098/SEK/SK.KP3.4. 5/X/2023	S-2

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Informasi, dan Pelaporan			
					Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	2023-10- 02	1098/SEK/SK.KP3.4. 5/X/2023	S-1
35	Nanni, S,AN 198409172008012003	Penata Muda III/a	2022-10-01	823/1506/DKPSDM/I X/2022				
36	Arridha Ahmad, S.Sy. 199310062024051001	Penata Muda III/a	2024-05-01	1229/SEK/SK.KP1.2.6 /IV/2024	Klerik - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Permohonan	2024-05- 01	1229/SEK/SK.KP1.2. 6/IV/2024	S-1
37	Muafiyah, S.H. 199806102024052001	Penata Muda III/a	2024-05-01	1236/SEK/SK.KP1.2.6 /IV/2024	Klerik - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Gugatan	2024-05- 01	1236/SEK/SK.KP1.2. 6/IV/2024	S-1
38	Nurfajriani, S.H. 200109032024052001	Penata Muda III/a	2024-05-01	1244/SEK/SK.KP1.2.6 /IV/2024	Klerik - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum	2024-05- 01	1244/SEK/SK.KP1.2. 6/IV/2024	S-1
39	Rofika Khoirotnun Nisa, A.Md. 199510162020122008	Pengatur Tingkat I II/d	2024-04-01	60/KPTA/SK.KP2.1.1/I II/2024	Arsiparis Terampil, Sekretaris	2022-08- 26	1009/SEK/Kp.I/SK/IV III/2022	D-III
40	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md. 199505022020121004	Pengatur Tingkat I II/d	2024-12-01	177/KPTA/SK.KP2.1.1 /XI/2024	Klerik - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Umum dan Keuangan	2023-10- 02	1098/SEK/SK.KP3.4. 5/X/2023	D-III
41	St. Samsidar, A.Md. 199604142020122009	Pengatur Tingkat I II/d	2024-04-01	57/KPTA.W26- A/SK.KP2.1.1/III/2024	Arsiparis Terampil,	2024-11- 08	4422/SEK/SK.KP4.1. 3/XI/2024	D-III

NO	NAMA NIP	GOLONGAN			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	St. Samsidar, A.Md. 199604142020122009	Pengatur Tingkat I II/d	2024-04-01	57/KPTA.W26- A/SK.KP2.1.1/II/202 4	Arsiparis Terampil, Subbagian Umum dan Keuangan	2024-11- 08	4422/SEK/SK.KP4.1. 3/XI/2024	D-III
42	Herdha Rahma Anugrah, A.Md.Ak 199905302022032008	Pengatur II/c	2022-03-01	1664/SEK/CPNS.04.1 /SK/II/2022	Klerik - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Umum dan Keuangan	2023-10- 02	1098/SEK/SK.KP3.4. 5/X/2023	D-III
43	Wahyuni Isfa Aulia, A.Md 199608272022032015	Pengatur II/c	2022-03-01	3050/SEK/CPNS.04.1 /SK/II/2022	Klerik - Pengelola Penanganan Perkara, Panitia Muda Gugatan	2023-10- 02	1098/SEK/SK.KP3.4. 5/X/2023	D-III
44	Metria Dwi Virahesti, A.Md.A.B. 199905182022032012	Pengatur II/c	2022-03-01	3052/SEK/CPNS.04.1 /SK/II/2022	Klerik - Pengelola Penanganan Perkara, Panitia Muda Gugatan	2023-10- 02	1098/SEK/SK.KP3.4. 5/X/2023	D-III

Bone, 06 Desember 2024
Ketua Pengadilan Agama Watampone,


Dra. Hj. Nurlinah K. S.H., M.H.,
NIP. 196712311994032020

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



DATA ASET & INVENTARIS

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Tgl.Data : 06/01/25 6:34 AM
Tgl.Cetak : 06/01/25 10:03 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_por

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,188,000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	54,000
131111	Tanah	5,238,828,000
132111	Peralatan dan Mesin	2,836,407,068
133111	Gedung dan Bangunan	7,799,644,100
135121	Aset Tetap Lainnya	15,354,679
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2,512,960,154)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,267,931,930)
JUMLAH		12,110,583,763

Watampone, 6 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS

ZAINUDDIN, S.Ag
197310152001121004

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Tgl Data : 06/01/25 6:34 AM
Tgl Cetak : 06/01/25 10:02 AM
Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_sakter_poc

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
			KUAN- TITAS	NILAI	BER TAMBAH		BER KURANG		KUAN- TITAS	NILAI
					6	7	8	5		
131111	Tanah		4	5					10	11
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golonggan II	M2	4.732	5.238.828.000	0	0	0	0	4.732	5.238.828.000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	M2	1.308	1.406.704.000	0	0	0	0	1.308	1.406.704.000
132111	Peralatan dan Mesin		3.424	3.832.124.000	0	0	0	0	3.424	3.832.124.000
3050205009	Tabung Gas	Buah	559	2.838.602.218	1	26.658.000	0	0	560	2.865.260.218
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	250.000	0	0	0	0	1	250.000
3050204001	Lemari Es	Buah	1	1.800.000	0	0	0	0	1	1.800.000
3050204006	Kipas Angin	Buah	7	9.800.000	0	0	0	0	7	9.800.000
3050206007	Loudspeaker	Buah	1	500.000	0	0	0	0	1	500.000
3050206027	Gambar Presiden Wakil Presiden	Buah	4	41.736.000	0	0	0	0	4	41.736.000
3050206080	Brackel Standing Peralatan	Buah	2	68.000	0	0	0	0	2	68.000
3100204001	Server	Buah	2	2.155.620	0	0	0	0	2	2.155.620
3100204021	Kabel UTP	Buah	3	140.410.000	0	0	0	0	3	140.410.000
3050105007	ICCTV - Camera Control Television System	Buah	1	60.000.000	0	0	0	0	1	60.000.000
3050105008	Papan Visual Papan Nama	Buah	4	15.240.000	0	0	0	0	4	15.240.000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	4.000.000	0	0	0	0	1	4.000.000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	7	31.170.520	0	0	0	0	7	31.170.520
3050206014	Microphone	Buah	7	3.846.150	0	0	0	0	7	3.846.150
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	1.350.000	0	0	0	0	1	1.350.000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Dummy	1	43.000	0	0	0	0	1	43.000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	9	23.839.800	0	0	0	0	9	23.839.800
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	49.699.000	1	26.658.000	0	0	4	76.357.000
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	27.450.500	0	0	0	0	1	27.450.500
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	Dummy	1	250.000	0	0	0	0	1	250.000
3050201005	Sice	Buah	5	49.017.500	0	0	0	0	5	49.017.500
3050206002	Televisi	Buah	6	34.910.000	0	0	0	0	6	34.910.000
3100102001	P C Unit	Buah	33	447.225.910	0	0	0	0	33	447.225.910
3100102002	Lap Top	Buah	33	417.845.000	0	0	0	0	33	417.845.000
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	1	16.483.500	0	0	0	0	1	16.483.500
3100204024	Switch	Buah	6	4.950.000	0	0	0	0	6	4.950.000
3020101003	Station Wagon	Unit	2	337.314.828	0	0	0	0	2	337.314.828
3050104001	Leman Besi/Metal	Buah	69	182.498.200	0	0	0	0	69	182.498.200
3050201008	Meja Rapat	Buah	2	12.980.000	0	0	0	0	2	12.980.000
3050201014	Meja Resepsions	Buah	2	9.998.000	0	0	0	0	2	9.998.000
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	22.495.000	0	0	0	0	1	22.495.000
3050206040	Palu Sidang	Buah	2	14.000	0	0	0	0	2	14.000
3050206060	Asbak Tinggi	Buah	4	2.000.000	0	0	0	0	4	2.000.000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Tgl Data : 06/01/25 6:34 AM
Tgl Cetak : 06/01/25 10:02 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

KODR	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 31 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
			KUANITAS	NILAI	BER TAMBAH		BER KURANG		KUANITAS	NILAI
					KUANITAS	NILAI	KUANITAS	NILAI		
3020104001	Sepeda Motor	Unit	8	117.710.000	0	0	0	0	8	117.710.000
3060102165	Camera Conference	Buah	1	25.518.900	0	0	0	0	1	25.518.900
3050201003	Kurs Besi Meja	Buah	168	161.062.300	0	0	0	0	168	161.062.300
3050201013	Meja Telepon	Buah	1	300.000	0	0	0	0	1	300.000
3050204004	A.C Split	Buah	19	97.648.000	0	0	0	0	19	97.648.000
3050206030	Tiang Bendera	Buah	6	1.080.000	0	0	0	0	6	1.080.000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	2	880.000	0	0	0	0	2	880.000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	6	8.450.000	0	0	0	0	6	8.450.000
3050104004	Rak Kayu	Buah	2	150.000	0	0	0	0	2	150.000
3050201004	Kurs Kayu	Buah	12	11.400.000	0	0	0	0	12	11.400.000
3050201020	Kurs Fiber Glas Plastik	Buah	7	13.332.500	0	0	0	0	7	13.332.500
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	2	45.000	0	0	0	0	2	45.000
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	2.992.000	0	0	0	0	1	2.992.000
3050206036	Kaca Hias	Buah	6	3.248.400	0	0	0	0	6	3.248.400
3050206042	Lambang Instansi	Buah	1	4.174.500	0	0	0	0	1	4.174.500
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	17.840.000	0	0	0	0	1	17.840.000
3100204014	Rak Server	Buah	2	18.226.590	0	0	0	0	2	18.226.590
3100204002	Router	Buah	3	12.474.000	0	0	0	0	3	12.474.000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	1	1.000.000	0	0	0	0	1	1.000.000
3050104007	Brandkas	Buah	2	15.250.000	0	0	0	0	2	15.250.000
3050205002	Kompor Gas (Aia: Dapur)	Buah	1	200.000	0	0	0	0	1	200.000
3050201002	Meja Kena Kayu	Buah	71	171.309.600	0	0	0	0	71	171.309.600
3050201017	Sketsel	Buah	2	8.745.000	0	0	0	0	2	8.745.000
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	1	350.000	0	0	0	0	1	350.000
3050206058	Gordyn/Kray	Buah	1	20.000.000	0	0	0	0	1	20.000.000
3050105001	Rak Besi	Buah	1	3.795.000	0	0	0	0	1	3.795.000
3060102135	Tabung Pemadam Api	Buah	5	4.500.000	0	0	0	0	5	4.500.000
3060347002	LCD Monitor	Buah	1	10.644.900	0	0	0	0	1	10.644.900
3060347002	Genset	Buah	1	149.985.000	0	0	0	0	1	149.985.000
133111	Gedung dan Bangunan		10	7.799.644,100	0	0	0	0	10	7.799.644,100
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	3	720.981.000	0	0	0	0	3	720.981.000
4010132001	Bangunan Tempat Parkir	Unit	1	109.033.000	0	0	0	0	1	109.033.000
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	292.059.000	0	0	0	0	1	292.059.000
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	6.115.138.100	0	0	0	0	1	6.115.138.100
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	2	44.702.000	0	0	0	0	2	44.702.000
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	2	517.731.000	0	0	0	0	2	517.731.000
135121	Aset Tetap Lainnya		466	15.354.679	0	0	0	0	466	15.354.679

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UAKPB : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Tgl Data : 06/01/25 6:34 AM
 Tgl Cetak : 06/01/25 10:02 AM
 Halaman : 3
 Kode Lap : lap_bmn_gab_sakter_poc

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
			KUANTITAS	NILAI	RETAKSIAN	RETAKSIAN	RETAKSIAN	RETAKSIAN	KUANTITAS	NILAI
			4	5	6	7	8	9	10	11
6010101002	Referensi:	Buah	5	367.990	0	0	0	0	5	367.990
601031999	Bahan Katogori Lainnya	dummy	8	400.000	0	0	0	0	8	400.000
6010102002	Majalah	Buah	6	90.000	0	0	0	0	6	90.000
6010101001	Monograf	Buah	444	14.431.689	0	0	0	0	444	14.431.689
6010102004	Laporan	Buah	3	75.000	0	0	0	0	3	75.000
TOTAL				15.892.428.997		26.658.000				15.919.086.997


 Watampone, 6 Januari 2025
 Penanggung Jawab UAKPB
 SEKRETARIS
 ZAINUDDIN, S.Ag
 197310152001121004

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309076 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Tgl.Data : 16/01/25 12:23 AM
Tgl.Cetak : 16/01/25 7:16 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_po

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,664,000
JUMLAH		1,664,000

Watampone, 6 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS



ZAINUDDIN, S. AG.
197310152001101004

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309076 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Tgl Data : 16/01/25 12:23 AM
Tgl Cetak : 16/01/25 7:12 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH	BERKURANG	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG									


SEKRETARIS
ZAINUDDIN, S.Ag.
 197310152001101004

Watampone, 6 Januari 2025
 Penanggung Jawab UAKPB

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



DATA KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 307509
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
SULAWESI SELATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 06/01/25 10:01 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 6/1/25 9:01 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.234.885.000	2.574.309.000	2.474.548.720	0	2.474.548.720	96,12	99.760.280
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	49.000	36.000	30.504	2.034	28.470	84,73	7.530
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	242.170.000	138.754.000	138.587.554	0	138.587.554	99,88	166.446
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	48.459.000	35.316.000	35.095.153	0	35.095.153	99,37	220.847
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	42.910.000	42.320.000	38.440.000	540.000	37.900.000	90,83	4.420.000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	5.464.980.000	3.105.040.000	3.026.560.000	0	3.026.560.000	97,47	78.480.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	991.634.000	521.911.000	519.514.455	0	519.514.455	99,54	2.396.545
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	116.658.000	100.439.000	90.597.420	0	90.597.420	90,2	9.841.580
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	357.720.000	357.720.000	342.227.000	0	342.227.000	95,67	15.493.000
511129	Belanja Uang Makan PNS	22.960.000	23.955.000	23.955.000	0	23.955.000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	388.800.000	178.200.000	162.000.000	0	162.000.000	90,91	16.200.000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	11.911.225.000	7.078.000.000	6.851.555.806	542.034	6.851.013.772	96,8	226.966.228
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 51	11.911.225.000	7.078.000.000	6.851.555.806	542.034	6.851.013.772	96,8	226.966.228
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	796.211.000	803.102.000	803.098.500	0	803.098.500	100	3.500
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.698.000	643.000	643.000	0	643.000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	57.576.000	57.576.000	57.576.000	0	57.576.000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.315.000	4.170.000	4.155.000	0	4.155.000	99,64	15.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	862.800.000	865.491.000	865.472.500	0	865.472.500	100	18.500
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15.950.000	15.950.000	15.950.000	0	15.950.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	15.950.000	15.950.000	15.950.000	0	15.950.000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	34.850.000	39.893.000	39.893.000	0	39.893.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	34.850.000	39.893.000	39.893.000	0	39.893.000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	2.400.000	786.000	783.489	0	783.489	99,68	2.511
522113	Belanja Langganan Air	17.040.000	9.942.000	9.937.000	0	9.937.000	99,95	5.000
522141	Belanja Sewa	143.130.000	75.720.000	75.720.000	0	75.720.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	162.570.000	86.448.000	86.440.489	0	86.440.489	99,99	7.511
5231	Belanja Pemeliharaan							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 307509
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
SULAWESI SELATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Kode Lap : LRA B S 2
 Tanggal : 06/01/25 10:01 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 6/1/25 9:01 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	275.218.000	390.681.000	390.681.755	0	390.681.755	100	245
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	78.300.000	78.300.000	78.300.000	0	78.300.000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	134.976.000	109.234.000	109.234.000	0	109.234.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	488.494.000	578.215.000	578.215.755	0	578.215.755	100	245
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	51.340.000	86.926.000	86.916.160	0	86.916.160	99,99	9.840
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.340.000	86.926.000	86.916.160	0	86.916.160	99,99	9.840
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	51.340.000	86.926.000	86.916.160	0	86.916.160	99,99	9.840
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1.616.004.000	1.672.924.000	1.672.887.904	0	1.672.887.904	100	36.096
	JUMLAH BELANJA	13.527.229.000	8.750.924.000	8.524.443.710	542.034	8.523.901.676	97,41	227.022.324

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 309076
JENIS SATUAN KERJA : KD

**MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
SULAWESI SELATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/01/25 10:09 AM
Halaman : 1
Prig ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/1/25 9:01 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional	96.000	96.000	96.000	0	96.000	100	0
521211	Belanja Bahan	96.000	96.000	96.000	0	96.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	96.000	96.000	96.000	0	96.000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan	3.800.000	12.200.000	12.200.000	0	12.200.000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.800.000	12.200.000	12.200.000	0	12.200.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	3.800.000	12.200.000	12.200.000	0	12.200.000	100	0
5221	Belanja Jasa	70.000.000	70.000.000	69.999.153	0	69.999.153	100	847
522131	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000	70.000.000	69.999.153	0	69.999.153	100	847
522191	Belanja Jasa Lainnya	952.000	392.000	392.000	0	392.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	70.952.000	70.392.000	70.391.153	0	70.391.153	100	847
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	106.794.000	52.116.000	52.116.000	0	52.116.000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	106.794.000	52.116.000	52.116.000	0	52.116.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	106.794.000	52.116.000	52.116.000	0	52.116.000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	181.642.000	134.804.000	134.803.153	0	134.803.153	100	847
	JUMLAH BELANJA	181.642.000	134.804.000	134.803.153	0	134.803.153	100	847

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA WATAMPONE 307509

Tgl Data : 06/01/25 12:53 AM
Tgl Cetak : 06/01/25 10:00 AM
Halaman : 2
lap_face_satker_new_poc

URAIAN	2024					2023				
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%		
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0		
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0		
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0		
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0		
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0		
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0		
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0		
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	8.750.924,000	8.523.901,676	(227.022,324)	97	10.373.445,000	9.825.019,607	548.425,393	95		
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0		

Keterangan :
BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

WATAMPONE, 6 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 197310152001121004

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA WATAMPONE 309076

Tgl Data : 06/01/25 12:53 AM
Tgl Cetak : 06/01/25 10:07 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024					2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0	
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	134,804,000	134,803,153	(847)	100	183,357,000	183,254,000	103,000	100	
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	

Keterangan :
BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

WATAMPONE, 6 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


 NIP. 197310152001121004

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



SK HAWASBID



**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR: 171/KPA.W20-A2/SK.PW1.1/XI/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif dan responentif Pengadilan Agama Watampone, maka dipandang perlu menunjuk Hakim Pengawas Bidang Peradilan Agama Watampone;
 - b. Bahwa nama-nama Hakim pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu diberi tugas Hakim Pengawas Bidang dimaksud di atas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/013/SK/IV/1994 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/007/SK/IV/1994 Tentang Pemberlakuan Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan.

MEMUTUSKAN

- Mencabut** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor: 49/KPA.W20-A2/SK.PW1.1/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Watampone Tahun 2024;
- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Watampone Tahun 2024;
- KESATU** : Menunjuk Hakim yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Watampone Tahun 2024;
- KETIGA** : Uraian tugas masing-masing Pengawas Bidang akan disusun sesuai lampiran;
1. Manajemen Peradilan :
 - a. Program Kerja
 - b. Pelaksanaan/pencapaian target
 - c. Pengawasan dan Pembinaan
 - d. Kendala dan hambatan
 - e. Faktor-faktor yang mendukung
 - f. Evaluasi kegiatan
 2. Administrasi Perkara :
 - a. Prosedur penerimaan perkara
 - b. Prosedur penerimaan permohonan banding
 - c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi
 - d. Prodedur penerimaan permohonan peninjauan kembali
 - e. Keuangan perkara
 - f. Pemberkasan perkara dan kearsipan
 - g. Pelaporan
 3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan :
 - a. Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim
 - b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara
 - c. Minutasi perkara
 - d. Pelaksanaan putusan (eksekusi)
 4. Administrasi Umum :
 - a. Kepegawaian
 - b. Keuangan
 - c. Inventaris
 - d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran
 - e. Pemanfaatan Teknologi Informasi
 5. Kinerja pelayanan publik :
 - a. Pengelolaan manajemen
 - b. Mekanisme pengawasan
 - c. Kepemimpinan
 - d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
 - e. Pemeliharaan/ perawatan inventaris
 - f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan
 - g. Kecepatan dan ketepatan penanganan

- KEEMPAT** : Hakim Pengawas Bidang bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone sebagai Koordinator Pengawas;
- KELIMA** : Hakim Pengawas Bidang melaksanakan pengawasan dan rapat evaluasi terhadap permasalahan yang ditemukan dan menyampaikan laporan kepada Koordinator Pengawas Bidang setiap triwulan sesuai dengan Lamporan II Keputusan ini. Selanjutnya mengupayakan solusi pemecahan terhadap kendala yang dihadapi dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone;
- KEENAM** : Koordinator dan Pengawas Bidang dalam melaksanakan tugasnya, senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan petunjuk Ketua Pengadilan Agama Watampone;
- KETUJUH** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Watampone

Pada tanggal : 11 November 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



Handwritten signature: *Nurlinah K*

Printed name: **KNURLINAH. K**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR : 171/KPA.W20-A2/SK.PW1.1/XI/2024
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2024

SUSUNAN PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2024

NO	BIDANG PENGAWASAN	NAMA/ NIP	SEKRETARIS
	Koordinator Hakim Pengawas Bidang	Hadrawati, S.Ag., M.H.I. NIP. 19730131 199802 2 003	Abdul Muhaemin
1.	Manajemen Peradilan	Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. NIP. 19691124 199403 2 004	Zelvyana M. Amin Firdaus
2.	Administrasi Perkara	Drs. M. Yunus K., S.H., M.H. NIP. 19611231 199103 1 014	Ahmad Amiruddin
3.	Administrasi Persidangan & Pelaksanaan Putusan	Drs. Dasri Akil, S.H. NIP. 19591231 198803 1 027	Iriani Muh.Haerul Huluk
4.	Administrasi Umum	Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. NIP. 196805111994032003	A. Ulfyah Nur Satriani
5.	Kinerja pelayanan publik	Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. NIP. 196110021988032001	Dyta Nurul Yunus Hermawati



KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NURLINAH. K

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



SK PTSP



**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR : 166/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/XI/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan administrasi terintegrasi yang mudah pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk tim pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Watampone;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud huruf a dan b diatas;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 6. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan

- Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Jo 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 04.1/DJA/KS.00/SK/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 Tentang "Standar Pelayanan Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama";
 11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 017/DjA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Agama;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Nomor 1403. b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Mencabut** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor: 141/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Watampone Tahun 2024;
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2024;
- KESATU** : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Watampone sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Watampone

Pada tanggal : 11 November 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE


NURLEINAH. K

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
 NOMOR : 166/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/XI/2024
 TANGGAL : 11 NOVEMBER 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dra. Nurlinah. K, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah
2	Hadrawati, S.Ag., M.H.I.	Wakil Ketua	Pengarah
3	Lukman Patawari, S.H.	Panitera	Penanggung Jawab
4	Muniroh Nahdi, S.H., M.H.	Sekretaris	
5	Andi Suardi, S.Ag.	Panmud Gugatan	Pelaksana
6	Bintang, S.H.	Panmud Permohonan	
7	Hayad Jusa, S.Ag.	Panmud Hukum	
8	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	
9	Ninik Hartini Mansyur, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan	
10	Hj. Asmah, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana	
11	Wahyuni Isfa Aulia, A.Md	Pengelola Perkara	
12	Andi Ulfyah Nur, S.Si.	Honorar	Petugas PNBP (Kasir)
13	Metria Dwi Virahesti, A.Md.A.B.	Pengelola Perkara	Petugas Pendaftaran Perkara
14	Hermawati, S.H.	Honorar	Petugas Pendaftaran Perkara
15	M. Amin Firdaus, S.E.I.	Honorar	Petugas Informasi dan Pengaduan (Operator Siwas)
16	Nur Islah Ugie Patawari, S.H.	Honorar	Petugas Penyerahan Produk
17	Sri Astuti Ana Darwis, S.H.	Honorar	Petugas Penyerahan Produk
18	Dyta Nurul Yunus, S.H.	Honorar	Petugas Pojok Ecourt dan Pelayanan
19	Abdul Muhaemin, S.Fil	Honorar	Petugas Pojok Ecourt

20	Muh. Haerul Huluk, S.H.I.	Honorar	dan Pelayanan Petugas Gugatan Mandiri
21	Ahmad Amiruddin, S.Sy	Honorar	Petugas Gugatan Mandiri
22	A. Achmad Husain, S.H.	Honorar	Petugas Antrian
23	Sulaeman Hakim	Honorar	Petugas Antrian
24	Sri Astuti Ana Darwis, S.H.	Honorar	Petugas Duta Layanan/Resepsionis

KEPUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



NURLINAH. K

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR : 166/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/XI/2024
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2024

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGARAH, PENANGGUNGJAWAB
PELAKSANA DAN PETUGAS TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2024**

1. Pengarah bertugas :

- Membentuk tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengarahkan, membina penanggungjawab, pelaksana dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mensosialisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada seluruh aparat pengadilan;
- Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengawasi dan mengevaluasi, membentuk dan mengoperasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyediakan sarana prasarana Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Meminta laporan pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara periodik maupun secara insidental kepada penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Penanggungjawab bertugas :

- Membentuk dan mengoperasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyediakan sarana prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Berkoordinasi dengan pimpinan, hakim pejabat dan pegawai pengadilan agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikelola dengan baik;
- Berkoordinasi dan memberi petunjuk kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memberikan laporan pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pengarah Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Meminta laporan pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara periodik maupun secara insidental kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memberikan teguran kepada pelaksana dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan selaku pengarah Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Pelaksana bertugas :

- Mengatur jadwal petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memberikan dokumen data dan informasi kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyusun laporan Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengoreksi hasil kerja petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidangnya;
- Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab kepada Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Petugas bertugas :

- Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
- Memberikan informasi dan petunjuk kepada pengguna layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab kepada pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NURLINAH. K f.

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



FOTO KEGIATAN

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



APEL SENIN PAGI

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



APEL JUMAT SORE

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



SENAM SKJ

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



PELAKSANAAN TES URINE

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



**UPACARA PERINGATAN
HARI KEBANGKITAN NASIONAL**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



PELAKSANAAN BUKA PUASA BERSAMA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



UPACARA PERINGATAN HARI NASIONAL

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



UPACARA PERINGATAN HARI NASIONAL

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



WISUDA PURNABHAKTI HAKIM